

**PERTIMBANGAN NON YURIDIS DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI NIKAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS
IA KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Tesis

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Negeri Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**Oleh
SITI HARDIYANTI RUKMANA
NIM: 1523010001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**PERTIMBANGAN NON YURIDIS DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI NIKAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS
IA KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Tesis

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**Oleh
SITI HARDIANTI RUKMANA
NIM: 1523010001**

**Pembimbing
Dr. H.Muhammad Zaki, M.Ag
Dr. H.Jayusman, M.Aag**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

Abstrak

Permohonan dispensasi nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung dari tahun ketahun hal ini mengalami peningkatan. Secara umum, hal ini berarti pergaulan bebas anak di bawah umur sudah banyak terjadi. Terdapat permohonan dispensasi nikah yang diterima dan yang ditolak. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung? dan Bagaimana tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim memutuskan perkara dispensasi nikah secara non yuridis di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung ?

Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: jenis penelitian kualitatif. Metode pendekatannya Hukum Islam. Data primer adalah dokumen penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung tentang dispensasi pernikahan dan hasil wawancara. Data sekunder, yaitu: peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi dan wawancara. Analisa data yang digunakan adalah secara induktif.

Kesimpulan penelitian ini adalah: Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung didominasi calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, lalu karena kedua calon mempelai telah keduanya telah melakukan zina dan terakhir karena mereka berpacaran terlalu intim sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan. Semua permohonan di atas pada prinsipnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. Adapun putusan permohonan dispensasi nikah yang ditolak karena dicabutnya perkara oleh para pemohon atau para pemohon tidak datang lagi ke Pengadilan Agama setelah sidang pertama. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena kelengkapan persyaratan administrasi dan atas pertimbangan menghindari kemafsadatan jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Analisis Masalah terhadap pertimbangan hakim memutuskan perkara dispensasi nikah. Dalam ajaran Islam tidak ada persyaratan usia jika hendak melaksanakan perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan ialah baligh, namun para ulama berbeda tentang ukurannya. Para calon mempelai ini dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah dan memelihara agama dan keturunan mereka. Tindakan hakim, ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya. Dan untuk menghindarkan mereka dari kemudaratn jika tidak segera menikah. Apa yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah sesuai dengan konsep masalah dalam kajian Ushul Fiqh..

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Hardiyanti Rukmana

NPM : 1523010001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA KOTA BANDAR LAMPUNG)**” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 2019

Yang menyatakan

Materai 6000

Siti Hardiyanti Rukmana

PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul” **PERTIMBANGAN NON YURIDIS DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA KOTA BANDAR LAMPUNG)**” ditulis oleh: Siti Hardiyanti Rukmana, NPM. 1523010001, telah disetujui untuk di ujikan dalam Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Dr. H. Jayusman, M.Ag

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Islam
UIN Raden Intan Lampung

Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP. 197411062000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Arab Latin

| Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|--------------------|
| ا | Tidak dilambangkan |
| ب | B |
| ت | T |
| ث | S |
| ج | J |
| ح | H |
| خ | Kh |
| د | D |
| ذ | Z |
| ر | R |
| ز | Z |
| س | S |
| ش | Sy |

| Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|-------------|
| ط | T |
| ظ | Z |
| ع | ‘ |
| غ | G |
| ف | F |
| ق | Q |
| ك | K |
| ل | L |
| م | M |
| ن | N |
| و | W |
| هـ | H |
| ء | ’ |

| | |
|---|----|
| ص | Sh |
| ض | Dh |

| | |
|---|---|
| ي | Y |
| | |

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harkat dan Huruf | Huruf dan Tanda |
|------------------|-----------------|
| ـَ | A |
| ـِ | I |
| ـُ | U |

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukurillah 'Ala ni'matillah kami panjatkan kehadiran Allah swt, dengan hidayah dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan tesis ini, dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Magister Hukum pada Program Pascasarjana UIN Lampung.

Betapapun kerja keras yang telah kami curahkan, namun kami tetap yakin dan menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Kami juga sangat menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan, arahan dan bimbingan dari semua pihak, oleh karenanya rasa hormat dan penghargaan yang tulus serta terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag; Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis untuk kuliah di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku Ketua Program studi dan Eko Hidayat, MH selaku Sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah mentransferkan ilmunya kepada penulis selama berada di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

5. Semua para karyawan program pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Terima kasih penulis haturkan kepada kedua orangtua ku tercinta Alm. KH. M. Sholeh Utsman dan Hj. Mastunah, serta orang terkasih KLS. Bahari Bambang Gatot Sisanjaya yang telah memberikan motivasi dan bantuan material serta spritual sehingga terselesaikan tesis ini.
7. Terima kasih penulis haturkan kepada rekan–rekan keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan tahun 2015.

Semoga Allah swt, memeberkati mereka semua. Segala jangkauan dan kemampuan, saya mengakui tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saya mengharapkan petunjuk, arahan, bimbingan, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari siapa pun, saya ucapakan terimakasih. Akhirnya semoga tesis ini dapat diambil manfaatnya bagi pembaca dan saya sendiri sebagai penulis.

Bandar Lampung, Nopember 2018

Penulis

Siti Hardiyanti Rukmana

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | I |
| ABSTRAK | Iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | Iv |
| HALAMAN PESETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | Ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah | 11 |
| C. Perumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Penelitian | 12 |
| E. Kegunaan Penelitian | 12 |
| F. Kajian Pustaka | 13 |
| G. Kerangka Teoritis | 15 |
| H. Metode Penelitian | 17 |
| I. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II | |
| DISPENSASI NIKAH | 20 |
| A. Dispensasi Nikah | 20 |
| 1. Pengertian Dispensasi Nikah | 20 |
| 2. Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah | 20 |
| 3. Izin Perkawinan | 29 |
| 4. Tujuan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur | 30 |
| B. Tinjauan Batasan Umur Melakukan Perkawinan | 31 |
| C. Pernikahan Wanita Pezina Dan Wanita Hamil | 38 |
| BAB III | |
| PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA KOTA BANDAR LAMPUNG | 43 |
| A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung | 43 |

| | | |
|--------|--|----|
| | B. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung | 44 |
| | C. Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang | 52 |
| | D. Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung | 62 |
| | E. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Kota Bandar Lampung | 66 |
| BAB IV | ANALISIS PERKARA DISPENSASI NIKAH STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA KOTA BANDAR LAMPUNG | 68 |
| | A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pengajuan Permohonan Perkara Dispensasi Nikah Di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung | 68 |
| | B. Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Secara Non Yuridis di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung | 80 |
| BAB V | PENUTUP | 88 |
| | A. Kesimpulan | 88 |
| | B. Saran | 89 |
| | Daftar Pustaka | 90 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi penerus yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia. Melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah menikah ini pula Allah swt menunjukkan betapa besar kasih kepada manusia dan betapa Maha Luas Pengetahuan Allah swt akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat.

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad. Mereka yang berasal dari keluarga yang berbeda, kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga.

Beberapa sarjana juga memberikan definisi mengenai perkawinan. Definisi tersebut antara lain :

1. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.
2. K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹

¹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan, h. 38 dan lih. Faisal Luqman Hakim, *Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi*

3. Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pernikahan itu haruslah saling mencintai, sebab jika perkawinan dilakukan tanpa ada rasa saling mencintai maka perkawinan itu tidak akan bahagia dan kekal. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu berlangsung untuk seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah adalah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.³

atas 58 *Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 2, No. 1, Juni 2013, h. 220-221

² Perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut:

a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.

b. Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.

c. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.

d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.

e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.

g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.

h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia. Ibid, h. 224

³ Ibid, h. 220 dan lih. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 62

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
2. Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang orang tua meninggal dunia, maka ijin cukup dari orang tua yang masih hidup.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup.
5. Apabila ada perbedaan pendapat terhadap orang-orang yang disebut di atas, maka ijin dapat dimintakan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana bertempat tinggal.
6. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
7. Dalam hal ada penyimpangan terhadap hal di atas, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁴

Dalam Islam perkawinan mempunyai manfaat dan kepentingan-kepentingan sosial, Islam mengharamkan seorang muslim untuk menahan diri dari perkawinan dan berzuhud dengan niat melakukan *ruhbaniyah*, menyepi hanya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt.⁵ Melaksanakan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan gejolak seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah swt sehingga perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci dan luhur, serta dianjurkan agar setiap orang melaksanakan perkawinan. Firman Allah dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴ Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 1 tahun 1977 Tentang Perkawinan

⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, Cet. III*. Semarang: Asy-syifa', 1981, h. 4.

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*⁶

Ikatan perkawinan dalam Islam adalah akad bersifat lahir batin⁷ yang sangat kuat atau *misaqon gholizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ *misaqon gholizan* artinya perjanjian yang teguh. Istilah tersebut pertama-tama menunjuk pada perjanjian antara Allah dengan para nabi atau para rasulnya. Dengan menggunakan istilah *misaqon gholizan* untuk perkawinan, al-Quran secara tidak langsung menunjukkan kesucian hubungan antara Allah dengan manusia yang dipilih-Nya. Dengan demikian maka dalam suatu perkawinan diyakini adanya campur tangan Allah didalamnya bahkan al-Quran memandang perkawinan sebagai suatu hal dalam rangka mentaati agama (syariat). Sebuah Perkawinan merupakan perintah Allah walaupun perkawinan itu termasuk dalam bidang

⁶ QS. Ar-Rum ayat 21

⁷ Ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan oleh Sardjono dikatakan bahwa ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formal merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin berarti dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.²⁰ Dalam suatu perkawinan, tidak cukup jika hanya ada ikatan lahir saja tetapi juga ikatan batin. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya (suami isteri) maupun bagi masyarakat. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan ikatan jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan batin itu dalam tahap permulaan, diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya dalam hidup bersama, ikatan batin itu tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan lahir dan batin dibentuk oleh

suami isteri, diharapkan dapat berlangsung bahagia dan kekal sehingga dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Hal yang sama, dikemukakan oleh Subekti. Bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Dengan demikian maka perkawinan bukan untuk sementara tetapi berlangsung untuk selamanya dalam hidup bersama antara pria dan wanita selaku suami isteri. Faisal Luqman Hakim, op.cit, h. 223-224

⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

muamalat atau hubungan antara manusia dengan manusia. Nabi Muhammad dalam hadist menggarisbawahi pandangan sebagai setengah atau separo ibadah karena bukan hanya menyangkut perkara dunia semata-mata tetapi juga menyangkut Tuhan sehingga tidak mengherankan umat untuk berkeluarga.⁹

Sejumlah *nash* dalam Al-Quran, setidaknya terdapat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawadah* dan *rahmah*), tujuan refroduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.¹⁰ Menurut *Imam Ghazali* dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum ad-Din* dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan itu sebagai berikut: Memperoleh keturunan yang sah, Mencegah zina, Menyenangkan dan menentramkan jiwa, Mengatur rumah tangga, Usaha untuk mencari rizki yang halal, dan Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹¹ Tujuan-tujuan ini seiring dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah. Mulai dari sebelum pernikahan sampai dalam membina rumah tangga. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat terkait berbagai aspek kehidupan yang semakin rumit dan kompleks, permasalahan tentang perkawinanpun ikut terpengaruh dan menjadi semakin kompleks pula. Dan mungkin akhir-akhir ini kita telah banyak melihat berita-berita di berbagai media massa terkait isu-isu yang menyangkut perkawinan. Mulai dari masalah nikah siri yang dilakukan para pesohor negeri ini, masalah kawin kontrak, masalah poligami, perkawinan beda agama, perkawinan di bawah umur,

⁹ Al Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam, Katholik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 12-13 dan lih Faisal, op.cit, h. 224-225

¹⁰ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004, h.38

¹¹ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, 1989, h. 27-40.

¹² Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta

*satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (an-Nisa ayat 1)*¹³

Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih dengan cara yang diridai Allah swt.¹⁴ Dalam Islam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara laki-laki dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, kontrak ini mensyaratkan dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama.

Penentuan ini dipertegas dengan adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan semata, akan tetapi mempunyai nilai ibadah,¹⁵ dan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut:

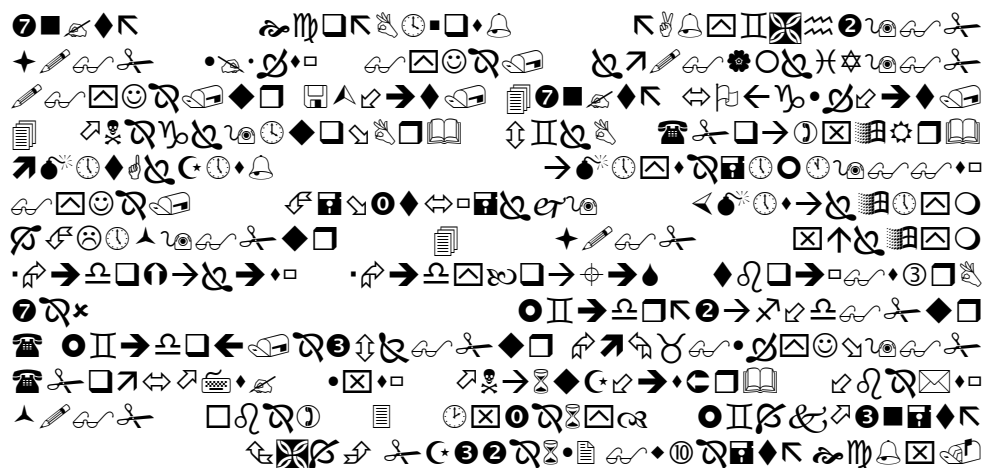
1. Berguna untuk meneruskan keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1971), h 61

¹⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta, 1985), h 49

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h 69

2. Dapat memelihara dan menjaga diri, serta jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat.
3. Dapat menjadikan kaum muslim lebih bertanggung jawab melindungi dan berusaha untuk menafkahi istrinya, sebagaimana firman Allah swt, dalam surat *an-Nisa* ayat 34:

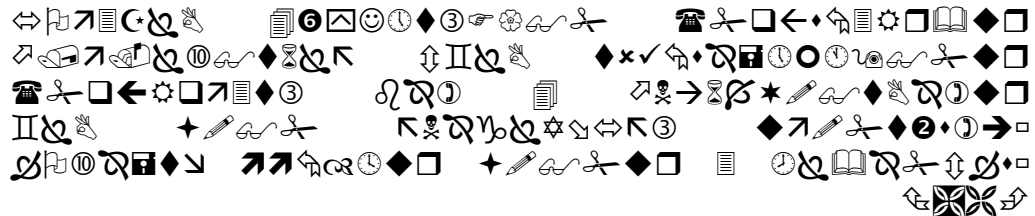


Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (an-Nisa: 34)¹⁶

4. Tercapainya ketenangan dan ketentraman antara suami dan istri serta terwujudnya perdamaian jiwa.
5. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dari tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia.
6. Mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antar satu sama lainnya.

¹⁶ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 66

Allah swt memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan pernikahan dan bahkan Allah swt membantu umatnya yang akan menjalankan pernikahan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt dalam surat *an-Nur* ayat 32:



Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah swt akan memampukan mereka dengan kurunia-Nya. dan Allah swt Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (al-Nur 32).¹⁷

Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang diinginkan, maka kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan. Namun banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan maka Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara jelas membahas tentang usia perkawinan. Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.¹⁸

Dalam sebuah pernikahan batas usia sudah ada batas umurnya, baik diatur dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam KHI. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup. Namun ketika salah satu

¹⁷ Ibid, h. 282

¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h 44

pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur tersebut maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah, agar bisa pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak KUA berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta pasangan tersebut mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) setempat.

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya lebih dipertimbangkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan. Maka perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya. Akan tetapi terkadang anak belum mencapai yang ditentu oleh perundang-undangan sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu. Untuk itulah bagi laki-laki yang berumur di bawah 19 tahun dan perempuan yang berusia 16 tahun untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama setempat.

Pentingnya penetapan dari PA untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas karena demi masa depan bagi sepasang calon yang ingin menikah, karena agar tidak terjerumus dalam pernikahan sirri (pernikahan sembunyi-sembunyi), lebih dikhawatirkan pasangan itu terjerumus dalam pergaulan bebas atau kebiasaan kehidupan kumpul kebo yang tidak sesuai dengan peraturan Agama maupun Negara.

Bagi masyarakat Bandar Lampung, permohonan dispensasi pernikahan yang dilakukan oleh orang tua pasangan yang di bawah umur di PA Tanjung

Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. Perkembangannya dari tahun ketahun hal ini mengalami peningkatan. Banyaknya permohonan dispensasi nikah yang ditetapkan, hal ini berarti pergaulan bebas sudah banyak terjadi. Dengan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut disebabkan karena hamil di luar nikah, atau karena kekhawatiran orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama, dan kekhawatiran terhadap pergaulan anak dan keinginan agar terhidari dari dosa besar yakni perzinaan; maka dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh mereka harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Hakim tentu saja mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk mengabulkan ataupun suatu perkara dispensasi nikah. Namun dari penelusuran penulis pada kasus-kasus dispensasi nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung cenderung semua perkara dispensasi nikah tersebut dikabulkan kecuali perkara yang dicabut ataupun para pihak tidak datang lagi ke pengadilan setelah sidang pertama. Apakah yang menjadi pertimbangan para hakim PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung sehingga mengabulkan semua perkara-perkara dispensasi nikah tersebut.

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul di antaranya adalah :

1. Maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja
2. Terdapat remaja yang hamil di luar nikah
3. Meningkatkan pengajuan dispensasi pernikahan
4. Terdapat pengajuan dispensasi nikah yang diterima dan terdapat pula yang ditolak oleh hakim.
5. Terdapat alasan-alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.
6. Faktor- faktor apa yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi nikah studi putusan PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung

Permasalahan penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan dilaksanakan di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung.
2. Perkara Dispensasi yang akan dikaji lebih lanjut dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017
3. Putusan yang dihasilkan dengan musyawarah majelis hakim.

C. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim memutuskan perkara dispensasi nikah secara non yuridis di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis tinjauan masalah terhadap Pertimbangan hakim memutuskan perkara dispensasi nikah secara non yuridis di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan khasanah keilmuan Hukum Keluarga Islam.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya dalam bidang dispensasi nikah.

F. Kajian Pustaka

Penelitian Faisal Luqman Hakim yang berjudul, “*Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*,” Penelitian ini ingin mengetahui apa saja alasan-alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, dari pihak siapa yang mayoritas mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, dan berapa rata-rata usia calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut. Hasil penelitian ini adalah bahwa alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan pengajuan permohonan perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena umur yang belum mencapai batas minimal padahal perkawinan tetap harus dilangsungkan karena adanya alasan yang sangat mendesak di mana calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil. Pihak yang paling banyak mengajukan permohonan adalah dari pihak calon mempelai laki-laki, dan rata-rata usia calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah 17 tahun 3 bulan.¹⁹

Penelitian Sri Ahyani yang berjudul, “*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*” Permohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia di bawah yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah

¹⁹ Faisal Luqman Hakim, *Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 2, No. 1, Juni 2013

dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah.²⁰

Penelitian Widihartati Setiasih yang berjudul, *"Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan."* Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi dispensasi perkawinan di bawah umur dalam putusan-putusan hakim pengadilan agama di propinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan bersifat diskriptif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utama dan pendukung yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Teknik analisa data diolah dan dibahas dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Putusan Majelis hakim hanya terpaku dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum yang jelas, sehingga putusannya tidak memperhatikan aspek-aspek kepentingan masa depan anak dan perempuan.²¹

Penelitian Faisal Luqman Hakim yang berjudul, *"Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011,"* membahas alasan-alasan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, dari pihak siapa yang mayoritas mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, dan berapa rata-rata usia calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut. Penelitian Widihartati Setiasih yang berjudul, *"Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan."* Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi dispensasi perkawinan di bawah umur

²⁰ Sri Ahyani yang berjudul, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah" Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016

²¹ Widihartati, Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan, Jurnal PPKM III (2017), ISSN: 2354-869X

dalam putusan-putusan hakim pengadilan agama di propinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian Sri Ahyani yang berjudul, “*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*” bahwa permohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia di bawah yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini

G. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Teori yang digunakan dalam menganalisis persoalan dalam tesis ini adalah *Maslahah*. *Maslahah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan akar kata *al-shalah*, yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat,²² baik dari segi *lafaz* maupun makna. Kata *maslahat* adalah bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masalih*.²³ Secara terminologi *maslahat* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madarat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam). Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴ Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk *kemadaratan* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *maslahat*.²⁵

Al-Ghazali memberikan definisi *maslahat* dalam kitab *al-Mustasyfa*, sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِإِعْتِبَارِ نَصٍّ مُعَيَّنٍ

²²Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ba;ai Pustaka, 1996), h. 634. Lihat juga Muhammad Sa'id Ramdhan al-Bûtî, *Dhawābit al-Maslahat*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2014), h. 37

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 354

²⁴ Ramadan al-Buti, *dhawabit al-Maslahat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Bairut: al-Muassasah al-Risalah, 1986), h. 37

²⁵ Fuad Irfan, *Munjid al-Thullab*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), h. 479. Lihat juga Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqasid al-syari'ah*, (Ardan: Dār al-Nafāis, 2010), h. 44

“Apa-apa (*maslahat*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”.²⁶

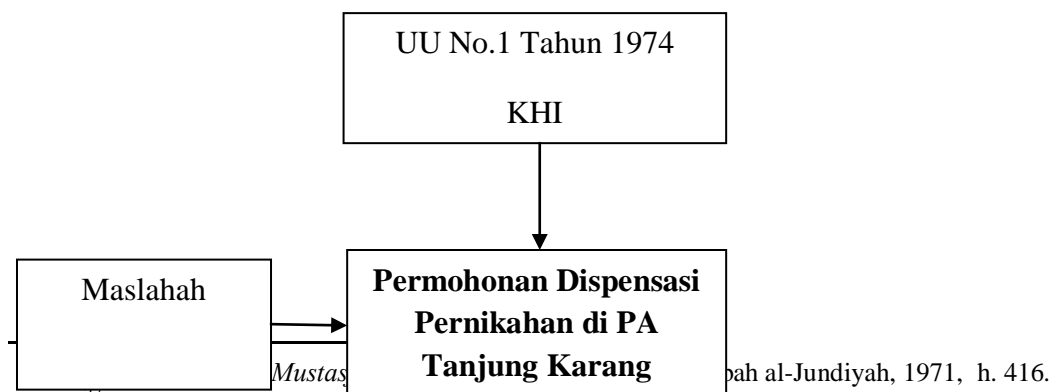
Selanjutnya, Imam al-Gazali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* ialah memelihara maksud atau tujuan *syara'*, yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemudlaratan “*جلب منفعة ودفع مضرة*”.²⁷

Dari segi keserasian, dan kesejalaran, antara akal dan tujuan *syarā'* dalam menetapkan hukum, terbagi tiga, yaitu:

1. *al-maslahat al-mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu *maslahat* yang diperhitungkan oleh *syāri'* maksudnya ada petunjuk dari *syāri'* baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maslahat* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
2. *al-maslahat al-mulghāh* (المصلحة الملغاة), yaitu *maslahat* yang dinggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syari'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.
3. *al-maslahat al-mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu, apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.²⁸

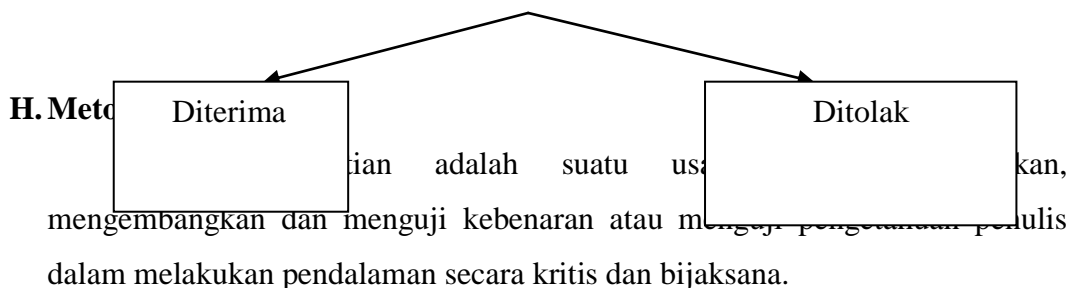
Adapun operasional teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam skema sebagai berikut ini:

Gambar 1
Skema Penelitian



²⁷ Ibid, h. 250-258.

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), 83



1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²⁹ Penelitian yang mengungkapkan persoalan pertimbangan non yuridis dalam memutuskan perkara dispensasi nikah (studi putusan pengadilan agama Tanjung Karang kelas IA kota Bandar Lampung).

2. Metode Pendekatan

Metode ini dilakukan dan ditunjukan pada praktek pelaksanaan hukum (*law in action*) terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis serta prakteknya dan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia (*law in books*), maka metode pendekatannya bersifat Kualitatif Yuridis Normatif, dalam hal ini menggunakan pendekatan hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber Data adalah sumber penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang meneliti dan mencari informasi penelitiannya berdasarkan jenis data dan sumber data yang didapatkan. Dari uraian penjelasan di atas, maka dalam penulisan yang penulis lakukan sumber yang perlu dikumpulkan meliputi:

²⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, Riduwan, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.25

- a. Data primer adalah dokumen penetapan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Kota Bandar Lampung tentang dispensasi pernikahan dan hasil wawancara dengan hakim dan panitera pengadilan yang pernah terlibat dengan penyelesaian perkara dispensasi pernikahan.
- b. Data sekunder, yaitu: peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini penulis mencari data tentang proses dispensasi nikah di bawah umur dari perkara-perkara dispensasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung dari tahun 2015-2017. Peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim dan panitera pengadilan yang pernah terlibat dengan penyelesaian perkara dispensasi pernikahan.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif yuridis Normatif, analisa data yang digunakan adalah secara induktif. Proses analisan data dimulai dengan penyeleksian data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Tahap selanjutnya, ialah meninjau aturan hukum positif perihal nikah di bawah umur. Adapun langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

- a. Menghasilkan penelitian dalam bentuk kronologis.
- b. Dari data yang sudah tersusun, kemudian diklasifikasikan untuk dijadikan dasar pijakan dalam menyelesaikan dan memberi jawaban atas persoalan yang diteliti, yakni sebab timbulnya adanya dispensasi pernikahan di bawah umur yang diperbolehkan di Pengadilan Agama dari segi Agama, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- c. Interpretasi data yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik dari data primer, data sekunder.

- d. Menarik kesimpulan terhadap persoalan yang sedang penulis teliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang tesis ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan tesis. Secara garis besar tesis ini terdiri dari lima bab, penulisan tesis ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang Dispensasi Nikah yang meliputi tentang pengertian Dispensasi Nikah, syarat pengajuan Dispensasi Nikah, izin perkawinan, tujuan pemberian Dispensasi Nikah di bawah umur dan tinjauan batasan umur melakukan perkawinan.

Bab ketiga menyajikan perkara dispensasi nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA pembahasan perihal profil dan sejarah Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, duduk perkara dispensasi nikah, alasan mengajukan dispensasi nikah, serta menguraikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

Bab keempat menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung dan tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim memutuskan perkara dispensasi nikah secara non yuridis di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan saran.

BAB II

DISPENSASI NIKAH

A. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.³⁰ Pengertian dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.³¹

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.³² Jika kedua calon suami isteri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

2. Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), h.36.

³¹ Poerwadarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal 88

³² Roihan A. Rasyid, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³³

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan Undang–Undang, dalam Permenag No. 03 tahun 1975 ditentukan:

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.³⁴

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal para Pemohon;
- c. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon 1 dan Ibu sebagai Pemohon, 2) *posita* (yaitu: alasan-alasan/ dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai lakilaki/perempuan), 3) *petitum* (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Selain prosedur untuk melakukan dispensasi kawin seperti yang telah diuraikan diatas, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan untuk mempermudah proses pengajuan dispensasi kawin. Hal-hal tersebut di antaranya adalah sebagai berikut ini:

- a. Menyertakan Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan AktaNikah Pemohon;

³³ . UU Nomor 1/1974 pasal 7(2)

³⁴ . Permenag Nomor 3/1975 pasal 1(2) sub g

- b. Menyertakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar;
- c. Menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
- d. Menyertakan Kartu Keluarga (bila ada);
- e. Menyertakan Akta Kelahiran Anak (bila ada);
- f. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Prosedur tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua wali pria maupun wanita yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, agar mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama untuk diajukan di KUA. Wali pun harus hadir dalam persidangan jika terdapat perbedaan usia yang tak lazim karena suatu hal penyimpangan. Peran wali atau orangtua harus hadir dalam persidangan untuk menjadi dalil kuat dipersidangan, bahwasanya orangtua bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak mereka. Kemudian Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;³⁵

Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur 21 tahun.³⁶

Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan sebagai berikut:

- a. Meja Konsultasi atau Pengaduan

³⁵ . *Ibid*

³⁶ Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama* (Bandung: Armico), h.65

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja (Meja Konsultasi atau Pengaduan) terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- 1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- 2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- 1) menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2) menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- 3) mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- 1) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- 2) Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.³⁷

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama.

Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon, dan calon anak

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.61

pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

- a. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut mengadili.
 - 1) Mengabulkan atau menolak permohonan pemohon.
 - 2) Menetapkan memberi atau tidak memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xx dengan xxx.
 - 3) Membebankan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.³⁸

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Dispensasi Nikah

- 1) Surat Permohonan.

³⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA (Bapak Drs. Abusseman Basthoni.,S.H., M.H)

- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 3) Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.
- 4) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 5) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).⁶³
- 6) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya. (Permeneg No3/1975 pasal 13(2)).

Perkara dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama ada kalanya yang diterima dan ditolak. Alasan Pengadilan Agama menolak perkara dispensasi nikah karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti pemohon tidak bisa membuktikan bukti-buktinya. Sedangkan alasan Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah ada tiga hal alasan prosedural:

a. Pemohon

Pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari laki-laki atau perempuan seperti diatur dalam Permenag No. 3 tahun 1975 pasal 12 ayat 3, maka majelis hakim dalam persidangan akan meneliti apakah yang mengajukan perkara permohonan dispensasi orang tuanya atau tidak.

b. Alasan Pengajuan

Alasan dispensasi nikah memang tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi hakim perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua apakah antara alasan si anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada.

c. Ada Larangan Kawin atau Tidak

Suatu pertimbangan yang selalu diterapkan dalam melaksanakan perkawinan adalah ada atau tidaknya larangan kawin sebagaimana diatur dalam UU perkawinan pasal 8 yang menyebutkan “Perkawinan dilarang antara 2 orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.³⁹

Dalam Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan karena pasal 39 sampai pasal 44. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

a. Karena Pertalian Nasab:

- 1) Wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- 2) Wanita keturunan ayah atau ibu.
- 3) Wanita saudara yang melahirkannya.

b. Karena pertalian kerabat semenda :

³⁹ Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, Cetakan III tahun 2009, h 6

- 1) Wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - 2) Wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - 3) Wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*.
 - 4) Wanita bekas istri keturunannya.
- c. Karena pertalian sesusuan :
- 1) Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - 2) Wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - 3) Wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - 4) Wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - 5) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu :

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 41:

- 1) Seorang pria memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istri:
 - a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istri telah ditalak *raj'i* tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42: “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa *iddah raj'i* atau pun salah seorang di antara mereka masih terikat perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah *talak raj'i*.”

Pasal 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali
 - b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
 - 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf (a) gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnya.
- Pasal 44 "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".⁴⁰

3. Izin Perkawinan

Izin Kawin ialah untuk perkawinan yang calon suami atau calon isteri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat Izin dari orang tuanya. Prosedur pengajuan izin perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki atau perempuan yang umurnya belum 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orang tuanya, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan;
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal Pemohon;
- c. Permohonan harus memuat: identitas pihak (calon suami/isteri yang belum umur 21 tahun sebagai Pemohon), posita (yaitu: alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas orang tua Pemohon dan calon suami/isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari Pengadilan).⁴¹

Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
- b. Kartu Keluarga (bila ada);

⁴⁰ *Ibid*, H 239-242

⁴¹ Dokumen Standar Operasional Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, "Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur", artiket diatas pada 09 April 2017 dari <http://www.sop/ap.com>

- c. Akta Kelahiran (bila ada);
- d. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

4. Tujuan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan. Oleh karena itu, perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya,⁴² Akan tetapi terkadang anak belum mencapai tahapan tersebut sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itu bagi yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.⁴³

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk menghindari mafsadat untuk para pihak dispensasi perkawinan maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Jelas sudah

⁴² Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematisa Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, h. 23.

⁴³ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016, h. 33-34

bahwa tujuan mengabulkan dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan para pihak dispensasi perkawinan, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

B. Tinjauan Batasan Umur Melakukan Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
4. Tidak melanggar larangan perkawinan.
5. Berlaku asas monogami.
6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.⁴⁴

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan maka seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi

⁴⁴ Gatot Supramono, *segi-segi hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h.15

kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Undang-Undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu Undang-Undang Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sekarang ini dikhawatirkan laju pertambahan penduduk Indonesia akan meningkat jika kawin dengan umur yang sangat muda.⁴⁵

Mengenai batasan umur untuk melakukan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam masih sama dengan acuan Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merangkan bahwa calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan apabila calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun maka calon mempelai mendapat izin sebagai mana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974. Penjelasan dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ayat (2): bahwa untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
2. Ayat (3): dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Ayat (4): dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

⁴⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h.17

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

4. Ayat (5): dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin.

Penulis menyimpulkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) (3) (4) (5): pada intinya mensyaratkan wali dalam perkawinan serta adanya hak hakim untuk mengganti status wali nasab dalam perkara tertentu, begitu juga tentang persetujuan perempuan dalam menentukan pilihan jodohnya. Kemudian pemerintah telah mengatur batas minimal usia calon mempelai dalam perkawinan pertama. Kebijakan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental. Dan pemaknaan dari pasal ini adalah pemerintah tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah usia minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang ini.

Menurut Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat *al- Nisa'* ayat 6:



*Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya. (an-Nisa' ayat 6)*⁴⁶

⁴⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.Cit.* h.61

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁴⁷

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh*. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.⁴⁸

Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu pada bagian tubuh tertentu merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu yang tumbuh pada bagian tubuh tertentu tersebut sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia *baligh* anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.⁴⁹

Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan diperhitungkannya amal ibadah dan dipertanggungjawabkannya amal seseorang adalah apabila yang bersangkutan telah akil baligh, oleh karena itu seorang pria yang belum baligh belum bisa melaksanakan *qobul* secara sah

⁴⁷ M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqihh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.37

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, t.kp., t.t., h.22

⁴⁹ Ibid, h.23

dalam suatu akad nikah.⁵⁰ Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kematangan Jasmani.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2. Kematangan Finansial atau Keuangan.

Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3. Kematangan Perasaan.

Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁵¹

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam *Safinatun Najah*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Pada saat usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.⁵²

Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun *Qamariyah* dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 (sembilan) tahun. Selain itu tumbuhnya rambut

⁵⁰ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h.26

⁵¹ Ukasyah Athibi, *Wanita mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.352

⁵² Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun najah, terj. Abdul Kadir Aljufri*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), h.3-4

kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.⁵³ Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan.

Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan di sini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”.⁵⁴

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang

⁵³ Aliy As'ad, Fathul Mu'in Julid 2, *terj. Moh. Tolehah mansor*, (Kudus: Menara, t.t), h. 232-233

⁵⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h,119

diletakkan Undang–Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁵⁵

Undang-Undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu Undang–Undang Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.⁵⁶

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi *syar’*nya mempunyai landasan yang kuat, seperti al-Qur’an surat *al-Nisa’* ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah swt) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah swt, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar(al-Nisa’ ayat 9)⁵⁷

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi

⁵⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, (Jakarta: Rineke Cipta, Cet.III, 2005), h.7

⁵⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h.17

⁵⁷ Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Op.Cit.*, h.61

berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Berhubung dengan hal itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya Undang-Undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁵⁸

Sayangnya Undang-Undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten, di satu sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, perlu dispensasi pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

C. Pernikahan Wanita Pezina Dan Wanita Hamil

Islam merupakan agama yang sangat menghormati kedudukan manusia. Penghormatan ini untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini,

⁵⁸ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Op.Cit, h.119

menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka.⁵⁹ Dalam memelihara keturunan, ajaran Islam melarang perzinaan dan segala bentuk perbuatan yang dapat menghantarkan pada perzinaan. Pelarangan ini bukan hanya mencakup tindakan kriminal pemerkosaan, tetapi juga hubungan seksual di luar nikah, meskipun didasarkan atas suka sama suka.⁶⁰ Meskipun rasa cinta dan hasrat berhubungan seks kepada lawan jenis adalah fitrah manusia, namun Islam mengharamkan hubungan tanpa nikah atau zina. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surah al-Isra: 32 “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”⁶¹

Dalam perspektif hukum Islam, *zina* adalah hubungan kelamin di antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah, dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya unsur *syubhat*.⁶² Zina juga berarti persetubuhan yang terjadi tanpa didasari oleh pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah (*syubhat*) dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba).⁶³ Zina digambarkan sebagai hubungan kelamin sesaat yang tidak bertanggung jawab.

Hukum Islam melarang perbuatan zina, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an (QS. Al-Isra: 32), yaitu: “*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*” Islam mengelompokkan pelaku zina dalam dua macam untuk menetapkan jenis hukuman yang akan dilaksanakan. Pertama, Zina *Muhshan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah menikah, baik masih terikat perkawinan maupun yang telah bercerai.¹⁹ Bagi pelaku zina *muhshan*, para ulama bersepakat bahwa hukumannya adalah

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, cet. ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 331.

⁶⁰ Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 24.

⁶¹ Asmanizar, Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Makalah h. 2

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), h. 86-87.

⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid*, terjemahan Abu Usamah Fakhur Rokhmin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 875.

dirajam. Kedua, *Zina Ghairu Muhshan*, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan antara keduanya. Hukuman bagi pelakunya adalah hukuman jilid atau cambuk sebanyak 100 kali. Pelaku zina *ghairu muhshan* juga diancam dengan hukuman pengasingan. Sedangkan dalam KHI, ketentuan tentang perbuatan zina tidak diatur secara spesifik, baik aspek definisinya maupun hukuman bagi pelakunya, karena KHI mengatur tentang keperdataan Islam. Sementara zina adalah bagian dari hukum pidana (*jinayat*). Undang-undang hanya mengatur tentang anak yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 ayat 1). Anak di luar perkawinan inilah sebutan lain dari anak zina dalam hukum Islam.

Nikah hamil sering diartikan dalam bahasa Arab dengan istilah (*al-tazawwuj bi al-haml*), yang diartikan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil yang mengandung dua kemungkinan; dihamili dahulu baru dinikahi, atau dinikahi oleh bukan orang yang menghamilinya.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum nikah hamil (hamil dari perzinahan) yaitu hubungan di luar perkawinan dan kewajibannya beriddah. Pertama, zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban beriddah. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil ataupun tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal suaminya untuk menyetubuhi secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia dalam kondisi hamil atau pun tidak. Hanya saja menyetubuhinya hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Ini adalah pendapat para ulama Syafi'i.

Kedua, jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya, atau laki-laki lain boleh menikahnya, dan dia tidak wajib beriddah. Ini adalah pendapat yang disepakati Imam Hanafi. Jika yang menikahi adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, menurut kesepakatan para ulama Hanafi. Dan anak adalah milik laki-laki tersebut, jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka ia bukan anaknya dan tidak

mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, “Ini adalah anakku bukan anak dari zina”.

Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi menurut Abu Hanifah dan Muhammad, tapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Sedangkan Abu Yusuf dan Za’far dari mazhab Hanafi memandang bahwa jika wanita yang berzina hamil, maka dia tidak boleh dinikahi.

Ketiga, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dan ia wajib ber-*iddah* dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil. Jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai *iddahnya* habis. Ini adalah pendapat Rabi’ah, al-Tsauri, al-Auza’i, dan Ishaq, ini adalah Mazhab Maliki dan Hanbali. Menurut para ulama mazhab Maliki, ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau berlakunya waktu tiga bulan. Hampir sama dengan Imam Ahmad, membebaskan rahim wanita dengan tiga kali haid. Sedangkan Ibn Qadamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim wanita dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibn Taimiyyah. Para ulama mazhab Hanbali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahi wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina.⁶⁴

Pendapat para ulama, di antaranya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali, menurut mereka, pernikahan keduanya sah, dan boleh bercampur sebagaimana suami istri, dengan ketentuan, bila pria tersebut yang menghamilinya dan kemudian mengawininya, namun tetap keduanya dicap sebagai pezina. Pendapat mereka berdasarkan pada ayat al-Qur’an, bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina.⁶⁵

Sementara bila melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, menurut KHI bab VIII pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

⁶⁴ Yahya Abdurrahman al-Khâtib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 71-72.

⁶⁵ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid ke-7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 148.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu dilahirkan anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶⁶

Akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan setelah enam bulan perkawinan memiliki hubungan nasab, perwalian, waris dan hak nafkah dari kedua orang tuanya. Namun, jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan pernikahan, maka tidak memiliki hubungan nasab, perwalian, waris dan hak nafkah dari bapaknya, kecuali adanya pengakuan dan pembuktian bahwa anak tersebut merupakan anak biologisnya. Sedangkan akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina menurut Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan memiliki hubungan nasab, wali nikah, kewarisan dan hak nafkah dari bapak yang menikahi ibunya, selama wanita hamil tersebut dinikahi dalam perkawinan yang sah. Namun bagi anak yang lahir di luar pernikahan, selain memiliki hubungan perdata dari ibu kandungnya, juga memiliki hak nafkah dari ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan secara ilmiah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 sebagai hasil *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁶ KHI bab VIII pasal 5 ayat (1), (2) dan (3)

BAB III

PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama, selalu berusaha mewujudkan tri fungsi yaitu pertama sebagai office, yang berarti pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat, kedua sebagai wahana yakni sebagai alat untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya hukum Islam di Indonesia, dan ketiga sebagai sub sistem hukum nasional yaitu kiprah Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung berjaln dan tidak terpisahkan dari sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu: cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedangkan dalam memberikan putusannya tetap memperhatikan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*.

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung sebagai pengadilan negara, dalam menjalankan tugas sehari-harinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Lampung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung berkedudukan di Bandar

Lampung dengan alamat Jalan Untung Suropati No. 2 Kedaton Bandar Lampung.

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib, dan damai di bawah lindungan Allah swt.

2. Misi

Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan masyarakat dalam kerangka sistem hukum nasional.⁶⁷

B. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m² di atas tanah seluas 400 m². Bangunan yang terletak di jalan Cendana N0. 5 Rawa Laut Tanjung karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa Balai Sidang karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syari'ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi,

⁶⁷ Data tersebut penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung

Mahkamah Syaria'ah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

Dasar Kebutuhan Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris, dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa/ perselisihan masyarakat.

Persoalan atau urusan masyarakat di bidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian, dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga, atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dalam masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/ hidup. Kebijakan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama di tengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau, ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

Dasar Yuridis menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, begitu juga bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639).

Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung Secara Yuridis Formal dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera

di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan: Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum, dan Tugas serta wewenangnya. Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi: Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, talak, rujuk, fasakh, kiswah, dan perceraian karena melanggar taklik talak. Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam. Mendaftarkan kelahiran dan kematian. Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam. Mengurus soal-soal peribadatan. Memberi fatwa dalam berbagai soal.⁶⁸

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum. Keadaan seperti ini sampai berlarut dan pernah diadukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Kehakiman, serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan Suratnya

⁶⁸ Ibid

tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor: Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI. Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”. Ketua Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”. Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan Suratnya Nomor: 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung.⁶⁹

Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Walaupun untuk sementara Mahkamah Syari’ah Lampung merasa aman dengan Surat dari

⁶⁹ 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syari'ah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syari'ah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

1. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
2. Organisasi Jamia'tul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
3. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.
4. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.
5. Walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera termasuk Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Wewenang Mahkamah Syari'ah sebagai berikut, yaitu :

“Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.⁷⁰

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syaria’h di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan: “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”. Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁷¹

Berdasarkan KMA Nomor 004/SK/II/1992 Struktur organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Struktur Organisasi PA Tanjung Karang Kelas IA

| | |
|---------------|--------------------------|
| Ketua | : H. Ediwarman |
| Wakil Ketua | : H. Ayep Saepul Miftah |
| Hakim – Hakim | : Hj. Maimunah A. Rahman |

⁷⁰ Tertuang dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1)

⁷¹ UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004

| | |
|--------------|------------------------|
| | : H.Abuseman Basthoni |
| | : Djauhari |
| | : Junaidi |
| | : Mufidatul Hasanah |
| | : Mulathifah |
| | : Firdaus |
| | : H.Hasan Faiz Bakry |
| | : Masiran Malkan |
| | : Ahmad Nur |
| | : Hafni Nalisa |
| | : H. Riskullah |
| | : A. Nasrul MD |
| | : Joni Jidan |
| | : Machfudi.S |
| | : Wasyhudi |
| Kepaniteraan | : Itna Fauza Qadriyah |
| | : Husnidar |
| | : Syukur |
| | : Deska Pitrah |
| | : Hi. Damsah |
| | : Nelmi Rodiah Harahap |
| | : Mahmilawati |
| | : Linda Hastuti |
| | : Amnia Burmella |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| | : Hj. Elok Diantina |
| | : Rosmiati |
| | : Astri Kurniawati |
| | : Anika Rahmah |
| | : Eliyati Sury |
| | : Nursiah |
| | : Vivi Wanty |
| | : Muhammad Djulizar |
| | : Rahmatiah Oktaviana |
| | : Senioreta Mauliasari |
| | : Nelfirdos |
| | : Kiptiyah |
| Juru Sita / Juru Sita Pengganti | : M. Rosyidi |
| | : Ahmad Subroto |
| | : Himbauan |
| | : Ari Eka Saputra |
| | : Haryati |
| | : Ali Haidar |
| | : Mega Octaria |
| | : Mulyati |
| | : Sri Widaryani |
| | : Dwi Astuti |
| | : Masturah |
| | : Nurhayati |

: Adriyadi

: Yasir

C. Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung

Karang

Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA yang akan penulis teliti dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017 terdapat 17 (tujuh belas) perkara. Namun perkara dispensasi nikah terhitung dari Tahun 2010 sampai dengan 2014 *nihil*, Kemudian terhitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terdapat 13 (tiga belas) perkara perkara dispensasi nikah yang telah ditetapkan penetapan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Perkara perkara dispensasi nikah yang terdaftar tahun 2015 yakni 2 (dua), tahun 2016 terdapat 7 (tujuh), dan tahun 2017 ada 4 (empat) perkara dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung.

Tabel 2 Dispensasi Nikah
Di PA Tanjungkarang Kelas IA Kota Bandar Lampung
2015 s/d 2017

| No | Tahun | No Perkara |
|----|-------|-------------------------|
| 1 | 2015 | 011/Pdt.P/2015/ PA.Tnk |
| 2 | 2015 | 026/Pdt.P/2015/ PA.Tnk |
| 3 | 2016 | 002/Pdt.P/2016/ PA.Tnk |
| 4 | 2016 | 015/Pdt.P/2016/ PA.Tnk |
| 5 | 2016 | 052/Pdt.P/2016/ PA.Tnk |
| 6 | 2016 | 054/Pdt.P/2016/ PA.Tnk |
| 7 | 2016 | 056/Pdt.P/2016/ PA.Tnk |
| 8 | 2016 | 0141/Pdt.P/2016/ PA.Tnk |
| 9 | 2016 | 0161/Pdt.P/2016/ PA.Tnk |

| | | |
|----|------|-------------------------|
| 10 | 2017 | 0005/Pdt.P/2017/ PA.Tnk |
| 11 | 2017 | 0007/Pdt.P/2017/ PA.Tnk |
| 12 | 2017 | 0019/Pdt.P/2017/ PA.Tnk |
| 13 | 2017 | 0025/Pdt.P/2017/PA.Tnk |

Sumber data: Register Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA

Adapun kedudukan perkara-perkara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nomor perkara: 0011/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tnk

Orang tua Pemohon I (Wagimin Bin Lasmowito) dan orangtua Pemohon II (Yani Bin Samsuri) memohon dispensasi pernikahan terhadap anak kandungnya atas nama Dina Octariani binti Wagimin (14 Tahun) dan Tegar Sopian bin A. Yani (17 Tahun). Anak Pemohon I yang bernama Dina Octariani binti Wagimin dan anak Pemohon II yang bernama Tegar Sopian bin A. Yani tersebut mau melangsungkan perkawinan, akan tetapi belum cukup umur menurut aturan Negara karena baru berusia 14 tahun dan 17 tahun, Pemohon I (Dina Octariani binti Wagimin) sudah pacaran 7 (tujuh) bulan lamanya dengan anak Pemohon II (Tegar Sopian bin A. Yani) tersebut sudah mendesak untuk dinikahkan oleh anak Pemohon II yang bernama Tegar Sopian bin A. Yani dan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri pada tanggal 04 Maret 2015 pukul 13.00 WIB. Sedangkan keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II sudah sepakat untuk menikahkan Dina Octariani binti Wagimin dengan Tegar Sopian bin A. Yani. Syarat-syarat pernikahan anak Pemohon I (Dina Octariani binti Wagimin dengan anak Pemohon II (Tegar Sopian bin A. Yani) menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur. Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon II pada KUA Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 474.4/42/VI.126/2015, tanggal 27 April 2015.

sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II.⁷²

2. Nomor perkara: 0026/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tnk

Anak Pemohon I yang bernama Ujang Hendi Bin Heri mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap (Selvi Resti Apridilla Maharani Binti Tigor Abraham Sihombing). Anak Pemohon I saat ini menjalin hubungan dengan Selvi Resti tersebut mau melangsungkan perkawinan, akan tetapi Pemohon belum cukup umur menurut aturan Negara karena baru berusia 17 tahun. Pemohon sudah berpacaran selama 10 (sepuluh) bulan dengan Selvi dan mendesak untuk dinikahkan karena Pemohon dengan Selvi sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih kurang pada akhir bulan April 2015 bahkan Selvi sedang hamil 4 (empat) bulan. Anak Pemohon dan Selvi sudah sepakat untuk menikah. Syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan Selvi menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat yaitu batasan umur yang masih di bawah umur, yang sampai saat ini belum mencapai 19 tahun. Antara Pemohon dengan Selvi tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, keluarga Pemohon dan orangtua Selvi telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya pada KUA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.08.9/10/PW 01/159/2015, tanggal 07 September 2015.⁷³

3. Nomor perkara: 0002/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Anak Pemohon I (Rachmat Indra Gunawan Bin Nazarullah) 18 tahun dan anak Pemohon II (Melda Agustina binti Masrik) 16 tahun. Anak Pemohon I dan anak Pemohon II mau melangsungkan perkawinan, akan

⁷² Salinan putusan nomor perkara: 0011/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tnk

⁷³ Salinan putusan Nomor perkara: 0026/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tnk

tetapi belum cukup umur menurut aturan Negara karena baru berusia 14 tahun dan 17 tahun. Anak Pemohon I sudah pacaran selama 7 (tujuh) bulan lamanya dengan anak Pemohon II. Mereka mendesak untuk dinikahkan oleh orang tuanya karena sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri. Sedangkan keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II sudah sepakat untuk menikahkan keduanya. Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang cukup umur, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II.⁷⁴

4. Nomor perkara: 0015/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Pemohon I orang tua dari Aditia Pratama bin M. Yusuf berusia 17 tahun mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap seorang wanita Diniaty binti Abdul Karim disebut Pemohon II, usia 20 tahun. Anak Pemohon I dengan Diniaty binti Abdul Karim mau melangsungkan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur menurut aturan Negara karena baru berusia 17 tahun. Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin selama 1 (satu) tahun dengan Diniaty binti Abdul Karim dan mendesak untuk dinikahkan karena Pemohon dengan Diniaty binti Abdul Karim sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih kurang pada tanggal 20 Nopember 2015 bahkan Diniaty binti Abdul Karim sedang hamil 3 (tiga) bulan. Keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan keduanya. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pada KUA Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan

⁷⁴ Salinan putusan Nomor perkara: 0002/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan pernikahan tersebut.⁷⁵

5. Nomor Perkara: 0052/Pdt.P/2016/PA.Tnk

Akmalludin bin Mamat, umur 41 tahun sebagai Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya yang bernama Shifa Amelia Putri binti Akmalludin yang mau melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Yogi Seto Prakoso bin Supriyadi, akan tetapi belum cukup umur menurut aturan Negara karena baru berusia 14 tahun. Anak Pemohon sudah lama pacaran lebih kurang 6 (enam) bulan dengan Yogi. Mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan. Bahkan pada tanggal 18 Oktober 2016 sudah dilaksanakan pertemuan keluarga kedua belah pihak dan sepakat keluarga Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon untuk segera melangsungkan pernikahan anak mereka. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 09 Nopember 2016, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur. Menyatakan permohonan Pemohon perkara Nomor: 0052/Pdt.P/2016/PA.Tnk. yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 20 Oktober 2016 gugur.⁷⁶

6. Nomor Perkara: 0054/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Mina Rustika binti Chaidir Anwar, umur 51 tahun, agama Islam, disebut Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anak kandung atas nama M. Aldo Saputra Bin Muhammad Rifa'i (18 Tahun) terhadap Elsa Saputri Binti Edwar Efendi (18 Tahun). Anak Pemohon dan Elsa mau

⁷⁵ Salinan putusan Nomor perkara: 0015/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

⁷⁶ Salinan putusan Nomor Perkara: 0052/Pdt.P/2016/PA.Tnk

melangsungkan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon I belum cukup umur menurut aturan Negara karena baru berusia 18 tahun. Anak Pemohon dan Elsa sudah menjalin selama 8 (delapan) bulan. Elsa mendesak untuk dinikahkan karena mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih kurang pada tanggal 08 Februari 2016 bahkan Elsa Saputri Binti Edwar Efendi sedang hamil 7 (tujuh) bulan. Mereka sudah sepakat untuk menikah. Syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Elsa Saputri Binti Edwar Efendi menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat yaitu batasan umur yang masih dibawah umur, yang sampai saat ini belum mencapai 19 tahun. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Elsa pada KUA Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan pernikahan tersebut.⁷⁷

7. Nomor Perkara: 0056/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anak kandung atas nama Okta Ade Nugroho bin Widodo Utomo (17 Tahun) terhadap Sepia Rahayu binti Tulus (17 Tahun). Anak Pemohon dengan Sepia mau melangsungkan perkawinan, akan tetapi Pemohon belum cukup umur menurut aturan Negara karena baru berusia 17 tahun. Anak Pemohon dan Sepia sudah menjalin hubungan cukup lama dan mendesak untuk dinikahkan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih kurang pada tanggal 27 Agustus 2016 bahkan Sepia telah hamil 7 (tujuh) bulan. Mereka sudah sepakat untuk menikah. Syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Sepia Rahayu binti Tulus menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat yaitu batasan umur yang masih dibawah umur, yang sampai saat ini belum

⁷⁷ Sajian putusan Nomor Perkara: 0054/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

mencapai 19 tahun. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Sepia Rahayu binti Tulus pada KUA Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, akan tetapi pihak KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Durian Payung Barat Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan pernikahan tersebut.⁷⁸

8. Nomor Perkara: 0141/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk.

Pemohon bernama: Nardi bin Na'im, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan nomor 0141/Pdt.P/2016/PA.Tnk tanggal 23 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya beralasan yang sah menurut hukum dengan mengirimkan surat pencabutan tertanggal 02 Januari 2016. Adapun isi surat tersebut sebagaimana terlampir, Majelis Hakim bermusyawarah dan setelah selesai bermusyawarah Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut: Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0141/Pdt.P/2016/PA.Tnk dari Pemohon, dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.⁷⁹

9. Nomor Perkara: 0161/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Pemohon M.Yusup bin Bugis, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama M. Purnama Jaya Putra bin M.Yusuf, umur 18 (delapan belas) untuk menikah dengan seorang wanita Mila Mayani HS binti Helmi HS Umur 18 tahun. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri, akan tetapi

⁷⁸ Nomor Perkara: 0056/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

⁷⁹ Nomor Perkara: 0141/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka Penghulu KUA Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung menolaknya dan mengeluarkan surat penolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut karena calon mempelai pria (anak Pemohon) belum cukup umur.⁸⁰

10. Nomor perkara: 0005/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk.

Mulyadi bin Samad mengajukan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya dan calon isteri anak Pemohon yang bernama: Muhammad Andre Kurniawan bin Mulyadi tersebut ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Fitri Purnama Sari Binti Santa, akan tetapi belum cukup umur menurut aturan Negara karena baru berusia 18 tahun. anak pemohon sudah lama pacaran lebih dari 1 tahun dengan Fitri dan berniat untuk melaksanakan sunnah Rosul diusia Muda demi Menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Syari'at Islam. Keluarga kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak mereka. Syarat-Syarat pernikahan. Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon agar ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang memerintahkan kepada KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung untuk Melaksanakan Pernikahan tersebut. Karena saat ini si calon isteri dalam keadaan hamil.⁸¹

11. Nomor perkara: 0007/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk.

Affandi bin Mukhtar Hadi mengajukan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya Affaridz Azhimi Adthoriq bin Affandi, usia 17 tahun, pekerjaan pelajar, dan calon istri anak Pemohon Nadila binti Soeherman, usia 17 tahun, pekerjaan pelajar, pendidikan SMA. Anak Pemohon yang bernama Affaridz Azhimi Adthoriq bin Affandi ingin melangsungkan perkawinan dengan Nadila akan tetapi belum cukup umur menurut aturan Negara karena baru berusia 17 tahun. Anak Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang memerintahkan kepada

⁸⁰ Salinan putusan Nomor Perkara: 0161/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

⁸¹ Salinan putusan Nomor perkara: 0005/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk

Penghulu pada KUA Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung untuk melaksanakan pernikahan tersebut.⁸²

12. Nomor perkara: 0019/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk.

Sulaini binti Dahlan sebagai Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama: Rizky Harun AlRasyid bin Muzakir berumur 17 tahun yang mau melangsungkan perkawinan dengan Suci Marantika binti Darsono yang berdomisili di Tanggamusyang dalam kondisi hamil 2 bulan. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada KUA Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang memerintahkan kepada Petugas Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan pernikahan tersebut.⁸³

13. Nomor perkara: 0025/Pdt.P/2017/PA.Tnk

Pemohon Budiono bin Sarbini berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama Anton Budi Nugraha bin Budiono dengan Saskya Sifa Octary binti Muhammad Yudi S.H Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur. Anak pemohon dan calon istrinya telah berhubungan selama tiga tahun. Pemohon menghendaki agar anaknya Anton Budi Nugraha bin Budiono dengan Saskya Sifa Octary binti Muhammad Yudi, SH segera dinikahkan, karena Saskya Sifa Octary binti Muhammad Yudi telah hamil 8 bulan.⁸⁴ Namun pemohon tidak pernah datang kembali dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka hakim menolak permohonan Pemohon.

⁸² Salinan putusan Nomor perkara: 0007/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk

⁸³ Salinan putusan Nomor perkara: 0019/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk

⁸⁴ Salinan putusan Nomor perkara: 0025/Pdt.P/2017/PA.Tnk

Berdasarkan data-data di atas diketahui bahwa pengajuan dispensasi pernikahan tersebut karena penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan pernikahan mereka karena tidak terpenuhinya usia minimal pernikahan. Hal itu dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3
Calon Mempelai Dispensasi Nikah

| No | No Perkara | Nama Pasangan | |
|----|---------------------------|--|--|
| | | Calon Suami | Calon Istri |
| 1 | 011/Pdt.P/2015/ PA.Tnk | Dina Octariani binti Wagimin (14 tahun) | Tegar Sopian bin A. Yani (17 tahun) |
| 2 | 026/Pdt.P/2015/ PA.Tnk | Ujang Hendi bin Heri (17 tahun) | Selvi Resti Apridilla Maharani binti Tigor Abraham Sihombing (17 tahun) |
| 3 | 002/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Rachmat Indra Gunawan bin Nazarrullah (18 tahun) | Melda Agustina binti Masrik (18 tahun) |
| 4 | 015/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Aditia Pratama bin M. Yusuf (17 tahun) | Diniaty binti Abdul Karim (20 tahun) |
| 5 | 052/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Shifa Amelia Putri binti Akmalludin (14 tahun) | Yogi Seto Prakoso bin Supriyadi (19 tahun) |
| 6 | 054/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | M. Aldo Saputra Bin Muhammad Rifa'i (18 tahun) | Elsa Saputri Binti Edwar Efendi (16 tahun) |
| 7 | 056/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Okta Ade Nugroho Bin Widodo Utomo (17 tahun) | Sepia Rahayu binti Tulus Soeparjo (17 tahun) |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 8 | 0141/Pdt.P/2016 / PA.Tnk | Anis Anjelina Binti Nardi (14 tahun) | Joko Gilar Bin Hamidi (21 tahun) |
| 9 | 0161/Pdt.P/2016 / PA.Tnk | M. Purnama Jaya Putra Bin M.Yusuf (18 tahun) | Mila Mayani HS Bti Helmi HS (18 tahun) |
| 10 | 0005/Pdt.P/2017 / PA.Tnk | Muhammad Andre Kurniawan (18 tahun) | Fitri Purnama Sari (20 tahun) |
| 11 | 0007/Pdt.P/2017 / PA.Tnk | Affaridz Azhimi Adthoriq bin Affandi (17 tahun) | Nadila binti Soeherman (17 tahun) |
| 12 | 0019/Pdt.P/2017 / PA.Tnk | Rizky Harun Al Rasyid bin Iqbal Muzakir (17 tahun) | Suci Marantika binti Darsono (19 tahun) |
| 13 | Nomor perkara: 0025/Pdt.P/2017 /PA.Tnk | Anton Budi Nugraha bin Budiono (17 tahun) | Saskya Sifa Octary binti Muhammad Yudi S.H |

Sumber data: Register Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA

D. Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung

Adapun alasan pengajuan perkara-perkara dispensasi nikah tersebut sebagai berikut:

1. Nomor Perkara: 0011/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tnk

Orang tua Pemohon I (Wagimin Bin Lasmowito) dan orangtua Pemohon II (Yani Bin Samsuri) memohon dispensasi pernikahan terhadap anak kandungnya atas nama Dina Octariani binti Wagimin (14 Tahun) dan Tegar Sopian bin A. Yani (17 Tahun) karena mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri.⁸⁵

2. Nomor perkara: 0026/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tnk

Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi pernikahan anaknya, yaitu: Ujang Hendi Bin Heri yang berusia 17 tahun terhadap Selvi Resti

⁸⁵ Nomor Perkara: 0011/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tnk

Apridilla Maharani Binti Tigor Abraham Sihombing. Anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon istrinya yang sekarang sedang hamil 4 (empat) bulan.⁸⁶

3. Nomor Perkara: 0002/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi pernikahan anaknya yang bernama Rachmat Indra Gunawan Bin Nazarullah yang berusia 18 tahun dengan anak Pemohon II yakni: Melda Agustina Binti Masrik yang telah berusia 16 tahun. Keduanya telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami isteri.⁸⁷

4. Nomor Perkara: 0015/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi pernikahan anaknya Aditia Pratama bin M. Yusuf (17 tahun) terhadap Diniaty binti Abdul Karim (20 tahun). Anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah hamil 3 (tiga) bulan.⁸⁸

5. Nomor Perkara: 0052/Pdt.P/2016/PA.Tnk

Pemohon Akmalludin bin Mamat mengajukan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya Pemohon yang bernama Shifa Amelia Putri binti Akmalludin berusia 14 tahun mau melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Yogi Seto Prakoso bin Supriyadi.⁸⁹ Mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan.

6. Nomor perkara: 0054/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Pemohon Mina Rustika binti Chaidir Anwar mengajukan dispensasi nikah terhadap anak kandung atas nama M. Aldo Saputra Bin Muhammad Rifa'i (18 Tahun) terhadap Elsa Saputri Binti Edwar Efendi (18 Tahun). Mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon istrinya sedang hamil 7 (tujuh) bulan.⁹⁰

⁸⁶ Nomor perkara: 0026/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tnk

⁸⁷ Nomor Perkara: 0002/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

⁸⁸ Nomor Perkara: 0015/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

⁸⁹ Nomor Perkara: 0052/Pdt.P/2016/PA.Tnk

⁹⁰ Nomor perkara: 0054/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

7. Nomor Perkara: 0056/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Pemohon I Widodo Utomo bin Munajat mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama Okta Ade Nugroho bin Widodo Utomo (17 Tahun) terhadap Sepia Rahayu binti Tulus (17 Tahun). Mereka telah melakukan hubungan suami istri dan calon istrinya sudah hamil 7 (tujuh) bulan.⁹¹

8. Nomor Perkara: 0141/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk.

Pemohon Nardi bin Na'im, Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama Anis Anjelina binti Nardi; umur 14 tahun untuk menikah dengan Joko Gilar bin Hamidi; usia 21 tahun. Mereka telah melakukan hubungan suami istri.⁹²

9. Nomor perkara: 0161/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Pemohon M. Yusup bin Bugis mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya M. Purnama Jaya Putra Bin M.Yusuf, umur 18 (delapan belas) tahun untuk menikah Mila Mayani HS Binti Helmi HS Umur 18 tahun. Anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri.⁹³

10. Nomor Perkara: 0005/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk.

Pemohon Mulyadi bin Samad mengajukan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya dan calon isteri anak Pemohon yang bernama: Muhammad Andre Kurniawan Bin Mulyadi berusia 18 Tahun ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Fitri Purnama Sari Binti Santa. Karena mereka telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini calon isteri dalam keadaan hamil.⁹⁴

11. Nomor Perkara: 0007/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk.

Pemohon Affandi bin Mukhtar Hadi mengajukan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya Affaridz Azhimi Adthoriq bin Affandi, usia 17 tahun untuk menikahi calon istri anak Pemohon Nadila binti Soeherman

⁹¹ Nomor Perkara: 0056/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

⁹² Nomor Perkara: 0141/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk.

⁹³ Nomor perkara: 0161/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

⁹⁴ Nomor Perkara: 0005/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk.

berniat untuk melaksanakan sunnah Rosul diusia muda demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.⁹⁵

12. Nomor Perkara: 0019/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk.

Pemohon Sulaini binti Dahlan mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandung Pemohon bernama: Rizky Harun Al Rasyid bin Muzakir yang berumur 17 tahun mau melangsungkan perkawinan dengan Suci Marantika binti Darsono. Karena mereka telah melakukan hubungan suami istri.⁹⁶

13. Nomor perkara: 0025/Pdt.P/2017/PA.Tnk

Pemohon Budiono bin Sarbini berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama Anton Budi Nugraha bin Budiono dengan Saskya Sifa Octary binti Muhammad Yudi S.H. karena mereka telah melakukan hubungan suami istri dan Saskya Sifa Octary binti Muhammad Yudi telah hamil 8 bulan.⁹⁷

Data-data alasan tentang alasan pengajuan dispensasi pernikahan di atas dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Alasan Dispensasi Nikah

| No | No Perkara | Alasan Permohonan |
|----|-------------------------|---|
| 1 | 011/Pdt.P/2015/ PA.Tnk | Telah berzina |
| 2 | 026/Pdt.P/2015/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 4 (empat) bulan |
| 3 | 002/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina |
| 4 | 015/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 3 (tiga) bulan |
| 5 | 052/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 4 bulan |
| 6 | 054/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 8 (tujuh) Bulan |
| 7 | 056/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 7 (tujuh) bulan |
| 8 | 0141/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina |

⁹⁵ Nomor Perkara: 0007/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk.

⁹⁶ Nomor Perkara: 0019/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk

⁹⁷ Salinan putusan Nomor perkara: 0025/Pdt.P/2017/PA.Tnk

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 9 | 0161/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina |
| 10 | 0005/Pdt.P/2017/ PA.Tnk | Telah berzina |
| 11 | 0007/Pdt.P/2017/ PA.Tnk | Menghindari Perbuatan Zina |
| 12 | 0019/Pdt.P/2017/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil |
| 13 | 0025/Pdt.P/2017/PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 8 bulan |

E. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Kota Bandar Lampung.

Adapun pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung yang terdaftar tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi

Dispensasi Nikah yang diberikan Pengadilan Agama dalam hal ini Hakim kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudarat yang lebih besar daripada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang artinya: “ *Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat .*” Karena menghindari mudarat yang lebih besar harus lebih didahulukan daripada menerima manfaat, sesuai dengan kaedah Fiqih di atas, maka Majelis Hakim berpendapat memberikan Dispensasi Nikah harus didahulukan ketimbang menolaknya.⁹⁸

Serta telah terbukti antara anak pemohon dengan calon istri atau suaminya telah menjalin hubungan yang terlalu dekat satu dengan lainnya sehingga dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinaan⁹⁹ dan sebagian besar mereka melakukan hubungan layaknya hubungan suami isteri.¹⁰⁰ Hubungan suami isteri tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai alasan doruri untuk

⁹⁸ Dianalisis dari putusan-putusan tersebut

⁹⁹ Kasus nomor 11

¹⁰⁰ Kasus nomor 1, 3, 9, dan 10

memberikan dispensasi nikah sejalan dengan kaedah fiqih tersebut di atas. Bahkan sebagiannya si calon istri dalam kondisi hamil.¹⁰¹

2. Hakim Mengabulkan Percabutan Permohonan Dispensasi

Terdapat perkara permohonan dispensasi pernikahan yang dicabut oleh pemohon. Setelah sidang perdana kemudian mengajukan perkara permohonan dispensasi pernikahan yang telah diajukan tersebut.¹⁰² bahwa kemudian berubah pikiran bahwa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur bukanlah penyelesaian terbaik dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Bahkan kemungkinan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi si anak dan calon pasangannya. Sehingga permohonan dispensasi pernikahan yang telah diajukan sebelumnya dicabut kembali oleh pemohon.

3. Hakim Menolak Permohonan Dispensasi

Terdapat perkara dispensasi pernikahan yang ditolak oleh majlis hakim. Perkara-perkara yang ditolak oleh majlis hakim tersebut ternyata karena pemohon tidak datang lagi setelah sidang pertama. Pemohon tidak pernah datang lagi ke persidangan setelah dilakukan beberapa kali pemanggilan secara patut. Berdasarkan kondisi tersebut maka majlis hakim kemudian menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.¹⁰³

¹⁰¹ Kasus nomor 2, 4, 6, 7, dan 11

¹⁰² Kasus nomor 8

¹⁰³ Kasus nomor 5 dan 13

BAB IV

ANALISIS PERKARA DISPENSASI NIKAH STUDI PUTUSAN PENGADILAN

AGAMA TANJUNG KARANG KELAS IA KOTA

BANDAR LAMPUNG

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pengajuan Permohonan Perkara Dispensasi Nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung

Ketentuan usia perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974, terdapat indikasi problematis usia perkawinan, hal ini muncul ketika dihadapkan pada Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin yang wewenang yuridis untuk keperluan itu diberikan kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan demikian undang-undang ini masih memberikan celah bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut pada Pasal 7 ayat (1) untuk memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan.

Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri, seperti yang dijelaskan bahwa dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikan suatu dispensasi. Dengan demikian dispensasi dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum.¹⁰⁴

¹⁰⁴ E Sumaryono, *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Jakarta: Kanisius, 2002

PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah yang masuk.¹⁰⁵ Walaupun kondisi atau faktor yang melatarbelakangi mereka dalam pengajuan dispensasi nikah itu berbeda-beda.

1. Ada anak pemohon yang berpacaran terlalu intim sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina.
2. Terdapat anak pemohon yang telah terlanjur berhubungan layaknya suami istri (zina).
3. Dan bahkan terdapat anak pemohon yang dalam kondisi sedang hamil.

Tabel 5
Alasan Dispensasi Nikah

| No | No Perkara | Alasan Permohonan |
|----|-------------------------|---|
| 1 | 011/Pdt.P/2015/ PA.Tnk | Telah berzina |
| 2 | 026/Pdt.P/2015/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 4 (empat) bulan |
| 3 | 002/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina |
| 4 | 015/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 3 (tiga) bulan |
| 5 | 052/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 4 bulan |
| 6 | 054/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 8 (tujuh) Bulan |
| 7 | 056/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 7 (tujuh) bulan |
| 8 | 0141/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina |
| 9 | 0161/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Telah berzina |
| 10 | 0005/Pdt.P/2017/ PA.Tnk | Telah berzina |
| 11 | 0007/Pdt.P/2017/ PA.Tnk | Menghindari Perbuatan Zina |
| 12 | 0019/Pdt.P/2017/ PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil |
| 13 | 0025/Pdt.P/2017/PA.Tnk | Telah berzina dan calon istri hamil 8 bulan |

¹⁰⁵ Karena perkara yang ditolak hanya perkara yang para pihak yang mengajukan dispensasi nikah tersebut tidak datang lagi ke pengadilan setelah dilakukan pemanggilan secara patut. Ataupun dikabulkannya pencabutan perkara oleh para pihak.

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari tiga belas kasus pengajuan dispensasi nikah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menghindari perbuatan zina sebanyak satu kasus
2. Telah berzina sebanyak lima kasus
3. Telah berzina dan calon istri hamil sebanyak tujuh kasus

Jadi faktor dominan pengajuan dispensasi nikah adalah bahwa factor telah berzina dan calon istri dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan yang berbeda-beda sebanyak tujuh kasus atau setara 53,8 persen. Lalu diikuti oleh faktor yang kedua telah berzina sebanyak lima kasus atau prosentasiya 38,5 persen dan terakhir untuk menghindari perbuatan zina sebanyak satu kasus atau 7,7 persen.

Pertimbangan hukum oleh Hakim berdasarkan untuk memutuskan perkara dispensasi nikah di bawah umur berdasarkan wewenang Pengadilan Agama untuk menangani jenis perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama. Kekuasaan Peradilan Agama atau kekuasaan *absolute*, diatur dalam Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan dispensasi nikah adalah diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di bawah umur, dalam praktiknya hakim memutuskan tidak memerlukan waktu atau persidangan yang lama. Hanya saja hakim mempunyai kriteria sendiri dalam memutuskan atau mengabulkan surat permohonan nikah di bawah umur, di antaranya:

1. Surat permohonan ditulis jelas oleh orang tua dari pelaku nikah di bawah umur; pada prinsipnya semua perkara pengajuan dispensasi nikah termasuk perkara yang diajukan ke PA Tanjung Karang Kelas IA dari tahun 2015-2017; diajukan oleh orang tua dari pemohon. Pada perkara kedua-duanya dari calon suami istri itu masih di bawah umur, maka kedua orang tuanya secara bersama-sama mengajukan permohonan dispensasi nikah. Sedangkan

pada perkara hanya salah satu dari calon suami istri tersebut yang di bawah umur, maka pihak orang tua calon suami atau calon istri itulah yang mengajukan dispensasi nikah. Uniknya variasi perkara-perkara tersebut terdapat dalam perkara dispensasi di PA Tanjung Karang Kelas IA. Terdapat kedua calon suami istri yang di bawah umur: 1 (satu) perkara atau prosentasenya 7,7 persen,¹⁰⁶ terdapat calon suami yang di bawah umur sebanyak 9 (sembilan) perkara atau prosentasenya 69,2 persen, dan juga ada perkara calon istri yang di bawah umur terdapat 3 (tiga) perkara atau prosentasenya 23,1 persen. Didominasi oleh pemohon orang tua calon suami, hal ini mungkin karena usia minimal calon suami yang lebih tua dari calon istri. Karena usia minimal calon suami 19 tahun sedangkan usia minimal calon istri 16 tahun. Sedang pasangan-pasangan yang tersebut adalah pasangan muda mudi yang seumuran yang masih duduk di bangku sekolah Menengah Atas (SLTA). Usia terendah calon suami adalah 17 tahun¹⁰⁷ dan usia terendah calon istri adalah 14 tahun.¹⁰⁸ Data pemohon dispensasi pernikahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Pemohon Dispensasi Nikah

| No | No Perkara | Nama Pasangan | | Pemohon Dispensasi Nikah (Orang Tua) |
|----|-----------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | Calon Suami | Calon Istri | |
| 1 | 011/Pdt.P/2015/PA.Tnk | Tegar Sopian bin A. Yani (17 tahun) | Dina Octariani binti Wagimin (14 tahun) | Calon suami Calon Istri |
| 2 | 026/Pdt.P/2015/PA.Tnk | Ujang Hendi bin Heri (17 tahun) | Selvi Resti Apridilla Maharani (17 tahun) | Calon Istri |

¹⁰⁶ Kasus nomor 1

¹⁰⁷ Kasus nomor 1,2, 4, 7, 11, 12, dan 13

¹⁰⁸ Kasus nomor 1, 5, dan 8

| | | | | |
|----|-----------------------------|--|---|-------------|
| 3 | 002/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Rachmat Indra Gunawan bin Nazarrullah (18 tahun) | Melda Agustina binti Masrik (18 tahun) | Calon suami |
| 4 | 015/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Aditia Pratama bin M. Yusuf (17 tahun) | Diniaty binti Abdul Karim (20 tahun) | Calon suami |
| 5 | 052/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Yogi Seto Prakoso bin Supriyadi (19 tahun) | Shifa Amelia Putri binti Akmalludin (14 tahun) | Calon Istri |
| 6 | 054/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | M. Aldo Saputra Bin Muhammad Rifa'i (18 tahun) | Elsa Saputri Binti Edwar Efendi (16 tahun) | Calon suami |
| 7 | 056/Pdt.P/2016/ PA.Tnk | Okta Ade Nugroho Bin Widodo Utomo (17 tahun) | Sepia Rahayu binti Tulus Soeparjo (17 tahun) | Calon suami |
| 8 | 0141/Pdt.P/2016 / PA.Tnk | Joko Gilar Bin Hamidi (21 tahun) | Anis Anjelina Binti Nardi (14 tahun) | Calon Istri |
| 9 | 0161/Pdt.P/2016 / PA.Tnk | M. Purnama Jaya Putra Bin M.Yusuf (18 tahun) | Mila Mayani HS binti Helmi HS (18 tahun) | Calon suami |
| 10 | 0005/Pdt.P/2017 / PA.Tnk | Muhammad Andre | Fitri Purnama Sari | Calon suami |

| | | | | |
|----|--|--|--|-------------|
| | | Kurniawan (18 tahun) | (20 tahun) | |
| 11 | 0007/Pdt.P/2017 / PA.Tnk | Affaridz Azhimi Adthoriq bin Affandi (17 tahun) | Nadila binti Soeherman (17 tahun) | Calon suami |
| 12 | 0019/Pdt.P/2017 / PA.Tnk | Rizky Harun Al Rasyid bin Iqbal Muzakir (17 tahun) | Suci Marantika binti Darsono (19 tahun) | Calon suami |
| 13 | Nomor perkara: 0025/Pdt.P/2017 /PA.Tnk | Anton Budi Nugraha bin Budiono (17 tahun) | Saskya Sifa Octary binti Muhammad Yudi S.H | Calon suami |

Sumber data: Register Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA

2. Ada faktor yang melatarbelakangi adanya niat serta keinginan yang kuat untuk menikah dari kedua pasangan yang ingin menikah; dalam proses persidangan terbukti dari keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan bahwa keinginan untuk menikahkan pasangan-pasangan tersebut datang dari keluarga kedua belah pihak. Hal ini mungkin juga karena kondisi dari pasangan-pasangan tersebut yang berpacaran lama dan hubungan mereka sedemikian dekat, atau telah melakukan hubungan layaknya suami istri (zina), bahkan sebagian calon istri tersebut dalam kondisi hamil.
3. Ada surat atau keterangan yang jelas perihal penolakan nikah dari kantor urusan agama (KUA); Keluarga para pihak telah sepakat untuk menikahkan pasangan-pasangan tersebut dan telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA sesuai domisili mereka. Namun permohonan tersebut ditolaak oleh KUA karena salah satu calon suami istri atau bahkan keduanya belum cukup umur, sesuai peraturan yang berlaku.

4. Ada keterangan dari alat bukti dan para saksi yang menguatkan isi dari permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Dalam proses persidangan, alat bukti yang dihadirkan dan keterangan dari para pihak tersebut dikuatkan oleh para saksi yang dihadirkan. Sehingga menguatkan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan tersebut.
5. Adapun pertimbangan Hukum Islam Majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi Nikah yang diberikan Pengadilan Agama adalah untuk menghindari terjadinya mudarat yang lebih besar daripada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqh yang artinya: “*Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menerima maslahat.*” Karena menghindari mudarat yang lebih besar harus lebih didahulukan daripada menerima manfaat, sesuai dengan kaedah Fiqih di atas, maka Majelis Hakim berpendapat memberikan Dispensasi Nikah harus didahulukan ketimbang menolaknya.¹⁰⁹

Maka dari itu keterangan lebih luasnya penulis paparkan sebagai berikut:

1. Pendapat dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA yaitu Bapak Ayep Saifullah Sebagai salah satu Hakim Ketua dalam penyelesaian suatu perkara dengan memutuskan suatu Putusan atau Penetapan Hukum Perihal Dispensasi Kawin di Bawah Umur. Beliau berpendapat bahwasannya tidak ada satu pasal atau satu ayatpun yang melarang atau tidak diperbolehkannya nikah di bawah umur. Namun tidak dipungkiri hanya ada bentuk rambu-rambu atau batasannya saja. Dalam praktiknya sanksi-sanksi bagi para pelaku yang berkaitan dengan adanya pernikahan di bawah umur yang menyimpang tidak ada sanksi atau pelanggaran yang jelas, baik dalam Hukum Publik maupun Hukum Positif.¹¹⁰
2. Pendapat dari Panitera Muda Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA yaitu Husnidar, sebagai salah satu Pegawai di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Beliau berpendapat bahwasannya nikah adalah fitrah dari

¹⁰⁹ Dikutip dari kutipan putusan-putusan dispensasi pernikahan

¹¹⁰ Wawancara dengan Ayep Saifullah, Wakil Ketua Pengadilan agama Tanjung Karang Kelas IA, Bandar Lampung, 07 Juli 2017

Allah swt dan sunnah Rasul yang harus diperoleh dengan jalan kemudahan dan kebaikan, dengan kata lain biasanya hakim tidak akan mempersulit jalannya proses persidangan, namun tidak dipungkiri adanya kriteria khusus bagi para hakim ketika mengabulkan sebuah penetapan nikah di bawah umur, harus ada beberapa temuan dan fakta persidangan di bawah ini, seperti :

- a. Melihat jalannya proses persidangan dari awal sampai pada menghadirkan para saksi-saksi;
- b. Menganalisa berkas-berkas yang sah sebagai suatu pembuktian seperti adanya surat penolakan nikah di bawah umur oleh kantor urusan agama (KUA) setempat. Surat keterangan dari orang tua yang mengizinkan anaknya nikah di bawah umur.
- c. Melihat apa sebab utama pelaku nikah di bawah umur, apa karena sudah cukup dewasa dalam berpikir atautkah sudah melakukan hubungan zina dan menghasilkan anak di luar nikah.¹¹¹

Angka dispensasi pernikahan dini di wilayah Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA memang cukup tinggi. Pengadilan Agama menurutnya kerap tidak bisa menolak permohonan seperti itu lantaran seluruh syarat permohonan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Faktor utama nikah di bawah umur kebanyakan beralasan karena hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan meskipun masih di bawah umur. Padahal tanpa dipungkiri dampak adanya nikah di bawah umur yang cenderung menimbulkan permasalahan yang lebih besar yakni perceraian. Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA menurutnya mempermudah dikabulkannya dispensasi pernikahan di bawah umur.¹¹²

3. Pendapat dari Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Bapak Sudiman memberikan pendapatnya, bahwasannya nikah usia di bawah umur sangat memalukan, lebih-lebih pernikahan di bawah umur

¹¹¹ Wawancara Sudiman, Staff Pengadilan agama Tanjung Karang Kelas IA di Bandar Lampung, 07 Juli 2014

¹¹² Ibid

kebanyakan tidak didaftarkan melainkan pernikahan sirri. Hal ini berakibat tingginya angka perceraian dan para janda yang status hidupnya kurang baik, apalagi jika memiliki anak saat usia relatif sangat muda. Pernikahan siri itu disebabkan adanya imej di masyarakat menengah ke bawah ketika berhadapan dengan hukum ataupun Pengadilan ada anggapan bahwa akan mengeluarkan uang yang cukup besar. Hal ini karena sosialisasi atau penyuluhan hukum di beberapa tempat kurang tersentuh dengan baik.¹¹³

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA dalam memutus perkara dispensasi nikah kawin adalah berdasarkan bukti–bukti serta dalil–dalil Pemohon. Dan selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Undang–Undang, majelis hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum Islam.

Analisis beberapa putusan mengabulkan permohonan Pemohon, mengenai dispensasi perkawinan dibawah umur oleh Hakim Pengadilan Agama dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum

- a. Berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai usia nikah;
- b. Tidak ada ketentuan mengenai larangan perkawinan (Syar'i) dan perundang-undangan yang dilanggar; Kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antarkeduanya, dan lain sebagainya. Ketentuan larangan perkawinan ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 hukum perkawinan. Untuk melaksanakan sebuah perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.

¹¹³ Ibid

- c. Siap menjadi ibu rumah tangga bagi perempuan dan siap menjadi kepala rumah tangga bagi laki-laki; Meskipun undang-undang perkawinandengan jelas telah mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16tahun (Pasal 7 ayat 1), akan tetapi juga muncul aturan bahwa perkawinandidasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Halini tentu bisa menjadi celah bagi dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan pemohon. Siap lahir batin atau fisik dan psikis serta telah akil baligh. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani. Sedangkan menurut salah satu asas pekawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan ini meminta kawin maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan kesiapan lahir batin fisik dan psikis anak.
- d. Sebagian sudah mempunyai penghasilan tetap; telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu penghidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya. Batasan usia perkawinan yang terdapat dalam hukum perkawinan bagi wanita adalah minimal umur 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Oleh karena itu, menurut penulis apabila mempelai wanita dan atau mempelai laki-laki tetap melangsungkan perkawinan maka harus ada jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan

mereka baik lahiriah maupun batiniah. Apabila tidak ada yang memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹¹⁴

- e. Kedua belah pihak orang tua telah memberikan persetujuan; Sangat mendesak karena telah berpacaran lala khawatir terjerumus pada perzinahan, ada yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil di luar nikah. Kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan; telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Atau terkadang pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orang tua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Bagaimana perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari mafsadat yang lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah.¹¹⁵
- f. Telah hamil; Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi nikah, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk. Ketentuan perkawinanwanita yang telah hamil ini diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Seorang wanita hamil di luar nikah,

¹¹⁴ Ali Imron Hs, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari 2011

¹¹⁵ Widihartati Setiasih, *Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*, Jurnal PPKM III (2017) 235 - 245 ISSN: 2354-869X,

dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya (ayat 1). Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (ayat 2).

2. Fakta-fakta di persidangan yang dikuatkan dengan:

- a. Keterangan kedua orang tua calon mempelai, keterangan kedua calon mempelai, keterangan saksi-saksi dari kedua calon mempelai yang langsung didengarkan dan dicatat di depan persidangan;
- b. Bukti-bukti tertulis lainnya seperti Fotocopy Akta Nikah kedua Orang tua mempelai, Fotocopy Akta Kelahiran kedua calon mempelai, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Ketua Pengadilan Agama segera mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami/calon istrinya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim memutuskan dikabulkan dispensasi dilihat dari beberapa unsur yakni: Kepastian Hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dari ketiga unsur di atas menjadi latar belakang diberikannya dispensasi umur perkawinan oleh Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:

1. Kepastian Hukum, pengajuan dispensasi nikah ini tentu saja agar anak pemohon dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahannya di KUA. Sehingga pengajuan dispensasi pernikahan ini dalam rangka mendapatkan kepastian hukum status pernikahan anak dari pemohon.
2. Rasa Keadilan; dalam kasus dispensasi usia perkawinan, faktor perkara ini diajukan karena telah terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum ada perkawinan yang sah. Hal tersebut yang paling dominan di kota Bandar Lampung rata-rata 53,8 (lima puluh tiga koma delapan) persen dari

permohonan dispensasi yang diterima. Dengan demikian hakim memberikan dispensasi karena memahami rasa malu bagi orang tua di kalangan masyarakat. Hakim menilai, orang tua yang melakukan permohonan dispensasi, merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum daripada menikahkan secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan.

3. Kemanfaatan hukum bagi masyarakat, dalam kasus pemberian dispensasi usia perkawinan dalam kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi pemohon. Apabila permohonan dispensasi tidak diberikan maka dampak yang ditimbulkan akan sangat lebih besar. Menurut penulis hal ini disebut perkawinan yang dilaksanakan secara terpaksa harus kawin. Karena dengan keabsahan status perkawinan di mata hukum, maka kepastian status hukum baik perempuan maupun anak yang dilahirkan dari perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sudah jelas.

B. Tinjauan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Secara Non Yuridis di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.” Dalam pasal ini terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai).¹¹⁶ dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat meminta

¹¹⁶ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: Uin Maliki Press, 2010, h. 63

dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Dan pada ayat (2) “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua Puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 98 ayat (1) KHI “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah yang masuk. Karena perkara yang ditolak hanya perkara yang para pihak yang mengajukan dispensasi nikah tersebut tidak datang lagi ke pengadilan setelah dilakukan pemanggilan secara patut. Walaupun kondisi mereka berbeda-beda.

Ada anak pemohon yang berpacaran terlalu intim sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina, ada yang telah terlanjur berhubungan layaknya suami istri, dan bahkan terdapat calon istri yang dalam kondisi sedang hamil. Memang kondisi mereka secara sepintas berbeda antara satu dengan lainnya, tetapi memiliki satu kesamaan yakni adanya kekhawatiran dalam hal ini orang tua dan tentu saja keluarga besar bahwa mereka akan terjerumus ke lembah perzinahan ataupun menghindari berlanjutnya perzinahan yang sudah terlanjur terjadi di antara mereka tentu saja dengan segala akibat negatifnya.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum nikah hamil (hamil dari perzinahan). Terdapat ulama yang membolehkan pernikahan mereka, Pertama, Boleh bagi laki-laki yang berzina dengan si wanita atau orang lain untuk menikahnya, baik dia dalam kondisi hamil atau pun tidak. Hanya saja menyetubuhinya hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Ini adalah pendapat para ulama Syafi’i.

Kedua, jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya, atau laki-laki lain boleh menikahnya. Ini adalah pendapat yang disepakati Imam Hanafi. Jika yang menikahi adalah laki-laki yang berzina

dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, menurut kesepakatan para ulama Hanafi. Dan anak adalah milik laki-laki tersebut, jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka ia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, “Ini adalah anakku bukan anak dari zina”.

Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi menurut Abu Hanifah dan Muhammad, tapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Sedangkan Abu Yusuf dan Za’far dari mazhab Hanafi memandang bahwa jika wanita yang berzina hamil, maka dia tidak boleh dinikahi.

Pertimbangan Hakim tentunya karena tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana tidak membahas secara khusus tentang dispensasi kawin dan Kompilasi Hukum Islam yang secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perka-winan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.

Berdasarkan teks di atas, terlihat KHI merupakan pendekatan kompromistis dengan hukum adat, terdapat pembaruan dalam KHI. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya *ikhtilaf* dalam ajaran fikih dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis.

Pemahaman yang diambil KHI jika dilihat dari formulasi pembaruan hukum Islam, lebih pada nalar rasional-filosofis dengan menggunakan paradigma nalar *burhani* sebagai pijakan pemikiran dengan melihat teks dan konteks hukum diberlakukan. Sifat yang dibangun dalam pembaruan hukum terhadap pernikahan wanita hamil lebih kepada *ekstra doctrinal reform*, yang melakukan pembaruan dalam hukum keluarga dengan cara memberikan penafsiran yang baru sama sekali terhadap nas yang ada, mengupayakan

ijtihad, dengan melihat kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, kompromistis terhadap *ikhtilaf* yang terjadi di kalangan ulama, dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis.

Sementara itu, dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3, Allah swt berfirman sebagai berikut: *"Lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi, melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin"*.

Dalam pertimbangan Hukum Islam Majelis hakim dalam pengabulan dispensasi Nikah yang diberikan Pengadilan Agama adalah untuk menghindari terjadinya mudarat yang lebih besar daripada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang artinya: *"Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat."* Karena menghindari mudarat yang lebih besar harus lebih didahulukan dari pada menerima manfaat, sesuai dengan kaedah Fiqih di atas, maka Majelis Hakim berpendapat memberikan Dispensasi Nikah harus didahulukan ketimbang menolaknya.

Undang-Undang perkawinan menetapkan batas umur diperbolehkannya suatu perkawinan dan hakim menggunakan prinsip menolak kemafsadatan karena bila terjadi suatu perkara tidak diterima atau ditolak, maka akan banyak terjadi kemadaratan di antara pasangan di bawah umur tersebut.

Dalam khazanah Fiqih, hukum menikah itu berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi dari calon pengantinnya yang akan melaksanakan pernikahan serta tujuan melaksanakannya. Perkawinan itu hukumnya wajib, bagi calon mempelai yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara dari pihak keluarga khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Bahkan bagi mereka yang belum mapan secara finansialpun jika dikhawatirkan tidak dapat menghindari zina. Tindakan hakim dalam hal ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.

Dalam hukum Islam tidak terdapat adanya persyaratan usia tertentu jika hendak melaksanakan perkawinan. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan ialah baligh. Tidak adanya batasan baligh yang cukup ketat dalam fiqih. Namun UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Di dalam al-Qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.¹¹⁷ Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan. Oleh karena itu, perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya,¹¹⁸ Akan tetapi terkadang anak belum mencapai tahapan tersebut sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itu bagi yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.¹¹⁹

¹¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h. 44.

¹¹⁸ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematisasi Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, h. 23.

¹¹⁹ Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016, h. 33-34

Selanjutnya pertimbangan hakim dalam pengabulan putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA akan ditinjau dengan teori *maslahah*. Aspek–aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara di antaranya dilihat dari sisi psikologis, sisi masa depan anaknya kelak, dan sisi sosialnya. Dari sisi psikologi, yang menjadi pertimbangan hakim adalah bagaimana nanti dampak bagi calon suami dan calon istri dispensasi nikah, apalagi bila calon istri dalam kondisi hamil. Maka calon istri akan menanggung aib. Hamil dan kemudian melahirkan tanpa memiliki suami. Anak yang dilahirkanpun malu karena tidak memiliki ayah. Beban psikologis ini akan berdampak luas kepada kehidupan sosialnya.

Apa yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah telah sesuai apabila menggunakan dasar *maslahah* karena setelah dikaji akan mudharat atau mafsadat yang akan ditimbulkan apabila kedua pemohon dispensasi nikah tanpa ikatan pernikahan. *maslahat* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madarat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam). Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²⁰

Misalnya dalam menjaga agamanya dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah mereka, berarti majlis hakim berupaya memelihara agama para pihak. Agar mereka terpelihara dari perbuatan dosa yang berkelanjutan yang sulit untuk mereka menghindarinya. Dengan demikian mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan berarti menjaga mereka dari perbuatan dosa dalam hal ini kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan ataupun menghindari mereka dari perbuatan zina yang berkelanjutan dengan segala akibat negatifnya; berarti telah turut menjaga agama mereka. Selanjutnya mengizinkan pernikahan berarti menyatukan mereka dalam naungan kehidupan bersama yang sesuai dengan tuntunan Islam. Pertobatan yang mereka lalukan dan mengiringinya dengan perbuatan yang baik dengan menikah semoga

¹²⁰ Ramadan al-Buti, *dhawabit al-Maslahat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Bairut: al-Muassasah al-Risalah, 1986), h. 37

mendapat ridho Allah untuk meraih keluarga Sakinah, Mawaddah, dan penuh rahmah.

Pengabulkan permohonan dispensasi nikah sangat terkait dalam menjaga keturunan mereka. Penting kiranya memiliki anak yang sah dalam perkawinan. Bagi pasangannya yang sudah terlanjur hamil, maka dikabulkannya permohonan dispensasi pernikahan berarti kesempatan bagi mereka untuk bertaubat dari kesalahan yang telah dilakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Calon suami bertanggung jawab terhadap anak yang sedang dalam kandungan calon istrinya. Keputusan menikah dan merawat kandungan tersebut sampai melahirkan lalu menjaga dan mendidiknya dengan baik setelah ia dilahirkan, adalah dalam hal menjaga keturunan. Keduanya lalu mengajarkannya nilai-nilai agama sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah.

Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk *kemadaratan* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *maslahat*.¹²¹

Namun demikian perlu adanya pertimbangan bahwa pengabulkan pengajuan dispensasi nikah tersebut tetap saja menyisakan permasalahan. Di antaranya banyaknya resiko yang harus dihadapi oleh seorang perempuan yang menikah muda dalam hal ini yang berumur kurang dari enam belas tahun. Potensi resiko ini disebabkan oleh:

1. Belum Matang Jasmani.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2. Belum Matang secara Finansial atau Keuangan.

Maksudnya dia belum mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

¹²¹ Fuad Irfan, *Munjid al-Thullab*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), h. 479. Lihat juga Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqasid al-syari'ah*, (Ardan: Dār al-Nafāis, 2010), h. 44

3. Belum Matang Perasaan.

Artinya perasaan untuk menikah itu belum tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.¹²²

¹²² Ukasyah Athibi, *Wanita mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.352

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung didominasi calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, lalu karena kedua calon mempelai telah keduanya telah melakukan zina dan terakhir karena mereka berpacaran terlalu intim sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan. Semua permohonan di atas pada prinsipnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. Adapun putusan permohonan dispensasi nikah yang ditolak karena dicabutnya perkara oleh para pemohon atau para pemohon tidak datang lagi ke Pengadilan Agama setelah sidang pertama. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena kelengkapan persyaratan administrasi dan atas pertimbangan menghindari kemafsadatan jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.
2. Analisis Masalah terhadap pertimbangan hakim memutuskan perkara dispensasi nikah. Dalam ajaran Islam tidak ada persyaratan usia jika hendak melaksanakan perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan ialah baligh, namun para ulama berbeda tentang ukurannya. Para calon mempelai ini dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah dan memelihara agama dan keturunan mereka. Tindakan hakim, ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya. Dan untuk menghindarkan mereka dari kemudaratannya jika tidak segera menikah. Apa

yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah sesuai dengan konsep masalah dalam kajian Ushul Fiqh.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung, penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Guna mengurangi bahaya yang ditimbulkan pernikahan di bawah umur, selayaknya hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah mempertimbangkan dengan matang dari berbagai aspek secara komprehensif. Sehingga pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah benar-benar bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik, guna terwujudnya keluarga yang sakinah sesuai tujuan perkawinan. Kiranya dapat diteliti lebih lanjut terkait keharmonisan pernikahan keluarga yang menikah setelah memperoleh penetapan dispensasi nikah dari pengadilan Agama.
2. Membuat gerakan bersama: “Menikah di usia matang” Ini hal yang paling sulit jika dilakukan secara bersama. Tetapi menjadi mudah dan ringan jika dimulai dari lingkup terkecil. Dengan gerakan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga seluruh anak Indonesia dan terpenting untuk seluruh anak Indonesia bisa menikah pada usia matang (produktif).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995)
- Abdurrohman, Dudung, *Mengembangkan Etika Berumah tangga menjadi moralitas bangsa menurut pandangan Al-qur`an*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2006)
- Abidin, Aminuddin Slamet, *Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari`Ah Komponen MKD*.(Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indanya Pernikahan Dini*,Gema Insani, (Jakarta:2002)
- Ahyani, Sri , “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016
- Aliy, As’ad, *Fathul Mu’in Jilid 2*, terj. Moh. Tolchah Mansor,(Kudus: Menara)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- , *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2007)
- As’ad, Aliy, *Fathul Mu’in Julid 2*, terj. Moh. Tolehah mansor, (Kudus: Menara, t.t)
- Athibi, Ukasyah, *Wanita mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998)
- Ayubiy, al-, Aiman Jabarin Juwailis, *Maqasid al-syari’ah*, (Ardan: Dār al-Nafāis, 2010)

- Basyir, Ahmad Azhar , *Keluarga Sakinah keluarga Surgawi*, (Titian ilahi press, 1994)
- Buti, al-, Ramadan, *dhawabit al-Maslahat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Bairut: al-Muassasah al-Risalah, 1986),
- Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, Undang-undang Perkawinan, (Semarang: CV. Alawiyah, 1974)
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1971)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1971)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)
- Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqihh Jilid II*, (Jakarta, 1985)
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001)
- Dokumen Standar Operasional Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, "Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur", artiket diatas diakses pada 09 April 2017 dari <http://www.sop/ap.com>
- E Sumaryono, *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Jakarta: Kanisius, 2002
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)
- Gazali. Al-. *al-Mustasfā Min 'Ilm al-Ushul*. Mesir: Maktabah al-Jundiyyah, 1971
- Ghazali, al-, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, 1989
- Hadhrami, Al , Salim Bin Smeer, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994)
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982)
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1991)

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Hadiwardoyo, Al Purwa, *Perkawinan Menurut Islam, Katholik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Hakim, Faisal Luqman, *Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 2, No. 1, Juni 2013
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986)
- Imron Hs, Ali, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari 2011
- Irfan Fuad, *Munjid al-Thullab*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990)
- Kurdi, al-, Najmuddin Amin, *Tanwir al-Qulb*, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, t.th.)
- Latif, Sutan Marajo Nasaruddin, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001
- Lubis, Salam, *Menuju Keluarga sakinah Mawaddah & Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang)
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Plaksana an Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*
- Marajo, Nasaruddin Latif Sutan, *Problematika Seputar keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001)
- Muchtar, Kamal, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: Uin Maliki Press, 2010
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, tkp., t.t.
- Muhadjirin, Noeng, *Metode Penelitian Kantor Urusan Agamalitatif* (Yogyakarta, Rake Sarasian, 1990)

- Mujieb, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Nasair, Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005)
- Nasution, Harun , *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang :Toha Putra, 1993)
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Poerwadarminta,. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001)
- Roihan A. Rasyid,1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*,(Bandung : PT Alma`arif, 1997)
- Saleh, Al- Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Salinan putusan nomor perkara: 0011/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tnk
- Salinan putusan Nomor perkara: 0002/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk
- Salinan putusan Nomor perkara: 0005/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk
- Salinan putusan Nomor perkara: 0007/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk
- Salinan putusan Nomor perkara: 0015/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk
- Salinan putusan Nomor perkara: 0019/ Pdt.P/ 2017/ PA.Tnk

Salinan putusan Nomor perkara: 0025/Pdt.P/2017/PA.Tnk

Salinan putusan Nomor perkara: 0026/ Pdt.P/ 2015/ PA.Tnk

Salinan putusan Nomor Perkara: 0052/Pdt.P/2016/PA.Tnk

Salinan putusan Nomor Perkara: 0054/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Salinan putusan Nomor Perkara: 0056/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Salinan putusan Nomor Perkara: 0141/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Salinan putusan Nomor Perkara: 0161/ Pdt.P/ 2016/ PA.Tnk

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, Riduwan, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sitompul, Anwar, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*(Bandung : Armico)

Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, (Jakarta: Rineke Cipta, Cet.III, 2005)

Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998)

Syafi'i, asy-, Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini Ad-Dimasyqi, Taqiyuddin Imam, *Kifayah al-Akhyar*, juz 2,(Semarang: Toha Putra)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Pranada Media group, 2006)

-----, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Thobroni, Aliyah A dan M. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2010)

Tjokrowisastro, Soedjito, *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*,(Jakarta: Bina Aksara, 1985)

TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 4*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000

Ulwan, Abdullah Nashih, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Cet. III. Semarang: Asy-syifa', 1981

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam,(Bandung :Citra umbara ,cetakan III tahun 2009)

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*,(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000).

Widihartati, Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan, Jurnal PPKM III (2017), ISSN: 2354-869X

Wawancara

Wawancara dengan Ayep Saifullah; Wakil Ketua Pengadilan agama Tanjung Karang Kelas IA, Bandar Lampung, 07 Juli 2017

Wawancara dengan Sudiman; Staff Pengadilan agama Tanjung Karang Kelas IA, Bandar Lampung, 07 Juli 2017